ANALISIS PENERAPAN DAN PEMANFAATAN DIGITALISASI KEUANGAN DAN MEDIA SOSIAL OLEH ANGGOTA

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan

Disusun Oleh:

Ine Anggraeni
1C1220095

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Konsentrasi Manajemen Keuangan

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Sugiyanto, S.E., M.SC



KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Kajian 1
1.2. Identifikasi Masalah 8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 8
1.3.1. Maksud Penelitian 8
1.3.2. Tujuan Penelitian 9
BAB II TINJAUAN TEORI & KEADAAN UMUM KOPERASI **10**
2.1. Pendekatan Perkoperasian 10
2.1.1. Jatidiri Koperasi 10
2.1.2. Tujuan, Fungsi dan Peran 18
2.1.3. Perangkat Organisasi Koperasi 19
2.1.4. Struktur Organisasi Koperasi 20
2.1.5. Jenis Koperasi 21
2.1.6. Usaha Koperasi 23
2.1.7. Manfaat Berkoperasi 23
2.1.8. Asas Kekeluargaan dalam Koperasi 25
2.2. Pendekatan Partisipasi Anggota dalam Koperasi 27
2.3. Pendekatan Digitalisasi dalam Perkoperasian 33
2.4. Pendekatan Komunikasi dalam Koperasi 40
2.5. Pendekatan Interaksi Sosial Anggota 45
2.6. Keadaan Umum Koperasi 47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN **57**
3.1 Identitas Informan 57
3.2 Bentuk Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan 58
3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan dan Media Sosial oleh Anggota 63
3.4 Kendala dan Upaya dalam Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan dan Media Sosial oleh Anggota 67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 75
5.1 Simpulan..... 75
5.2 Saran-Saran 77
DAFTAR PUSTAKA..... 78
LAMPIRAN..... 80

IKOPIN University

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kajian

Perkembangan digitalisasi telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang telah mendorong adanya perubahan pada pola perilaku masyarakat dari mulai cara berkomunikasi, memperoleh informasi hingga mengakses berbagai layanan secara lebih cepat dan efisien.

Adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara daring, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap internet. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2026), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2026 mencapai 81,72% dengan sekitar 235 juta jiwa penduduk telah terhubung ke internet. Berikut gambar data pertumbuhan tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 hingga 2026:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia Tahun 2024-2026

Sumber: (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2026)

Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 hingga 2026 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut turut mendorong terjadinya perubahan pada pola aktivitas masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung melalui tatap muka kini dapat dilakukan secara online melalui media sosial dan berbagai *platform* digital lainnya. Selain mengubah pola aktivitas masyarakat, perkembangan digitalisasi juga mendorong berbagai organisasi atau lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Salah satu lembaga ekonomi yang perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital adalah koperasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 222.264 unit yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Namun hanya sekitar 46.180 unit koperasi yang telah melakukan RAT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek tata kelola dan keterlibatan anggota koperasi, karena RAT merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan dalam koperasi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital mendorong koperasi untuk melakukan inovasi dalam sistem pengelolaan maupun pelayanan kepada anggota. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2021 tercatat sekitar 906 koperasi telah mengadopsi teknologi digital (Azmi, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital pada koperasi mulai berkembang, namun belum semua koperasi melakukan adopsi teknologi digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi koperasi masih menghadapi

berbagai tantangan, baik dari kesiapan organisasi, kemampuan penggunaan teknologi, maupun dalam keterlibatan anggota dalam memanfaatkan layanan digital.

Sebagai badan usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagaimana seperti yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang dijalankan secara bersama dan berfokus pada pelayanan anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan transformasi digital agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan dan daya saing ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Menurut Endy Alim Abdi Nusa yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur menyatakan bahwa koperasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi agar tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat (Kominfo Jatim, 2026). Proses digitalisasi pada koperasi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai kegiatan operasional koperasi yang mencakup proses pengelolaan administrasi, pelayanan simpan pinjam, penyampaian informasi kepada anggota, komunikasi melalui media sosial dan penyediaan layanan yang dapat memudahkan bagi anggota.

Digitalisasi pada koperasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas pelayanan kepada anggota. Melalui pemanfaatan teknologi digital, berbagai layanan koperasi

dapat diakses lebih mudah dan cepat sehingga koperasi mampu meningkatkan kepuasan anggotanya. Menurut Setiawati (2023), inovasi digitalisasi dapat membantu koperasi agar tetap relevan, meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi anggota ditengah adanya berbagai perubahan yang terjadi diera digitalisasi.

Keberhasilan digitalisasi pada koperasi tidak hanya dilihat dari adanya teknologi atau sistem digital yang memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja keras dan kreativitas pengurus serta peran aktif anggota atau tingkat partisipasi anggota (Setiawati, 2023). Berbeda dengan badan usaha lain koperasi memiliki karakteristik khusus yaitu anggotanya berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa (*dual identity*) yang memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan dan keberlanjutan penerapan digitalisasi. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi koperasi tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada keterlibatan aktif anggota dalam memanfaatkan layanan digital yang tersedia.

Arnom, et. al, (2025) menyatakan bahwa dibalik adanya optimisme digitalisasi, terdapat tantangan mendasar yang dapat menggerus koperasi yaitu krisis kepercayaan dan partisipasi anggota yang pasif. Kepercayaan merupakan sebuah modal sosial utama koperasi yang membedakannya dengan lembaga ekonomi lain. Kepercayaan dan partisipasi anggota menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sosial, rasa kekeluargaan serta pelaksanaan prinsip demokrasi dalam koperasi.

Dalam pengelolaannya koperasi dikelola secara demokratis dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh anggotanya. Partisipasi anggota dalam koperasi tercermin melalui keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan layanan koperasi, pemberian saran dan masukan serta dukungan terhadap berbagai kebijakan yang dilaksanakan koperasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, semakin besar pula peluang koperasi untuk berkembang secara berkelanjutan untuk mencapai tujuannya.

Bentuk keterlibatan anggota pada era digitalisasi berpotensi mengalami perubahan. Aktvitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat beralih ke media digital. Perubahan tersebut menuntut anggota untuk mampu dalam beradaptasi dengan teknologi agar digitalisasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan dan partisipasi anggota dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa, pemerintah Indonesia mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi yang profesional, transparan, akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui program ini, koperasi diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa

sekaligus mampu memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola koperasi.

Salah satu koperasi yang menjadi bagian dari program tersebut adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Koperasi tersebut dibentuk pada tanggal 14 April 2025 melalui proses penggabungan dengan Koperasi Citra Jaya Abadi yang telah berdiri sebelumnya. Penggabungan tersebut disepakati melalui Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk menjadikan Koperasi Citra Jaya Abadi menjadi Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan.

Sebagai koperasi yang didirikan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa, KDMP Cileunyi Wetan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penerapan sistem pelayanan dan pengelolaan berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan efektivitas pengelolaan koperasi serta kemudahan pelayanan kepada anggota.

Berdasarkan hasil observasi awal, pemanfaatan tekonologi digital telah dilakukan oleh Koperasi Citra Jaya Abadi sejak sebelum proses penggabungan menjadi KDMP Cileunyi Wetan. Pemanfaatan teknologi digital telah dilakukan pada beberapa kegiatan operasionalnya, seperti pencatatan administrasi keuangan, transaksi pembayaran digital, serta penyampaian informasi kepada anggota melalui media digital. Namun penerapan digitalisasi tersebut masih memerlukan dukungan partisipasi aktif anggota agar pemanfaatan layanan digital dapat berjalan secara

optimal. Selain itu, masih terdapat perbedaan kemampuan anggota dalam memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penerapan digitalisasi koperasi.

Disisi lain kajian penelitian mengenai digitalisasi koperasi selama ini lebih banyak membahas aspek penerapan teknologi, sistem informasi maupun peningkatan kinerja organisasi. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis tentang bagaimana penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial oleh anggota, khususnya pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan dipandang sebagai objek yang relevan untuk dikaji karena telah mulai menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan dan pelayanan kepada anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial oleh anggota koperasi, mencakup bagaimana penerapan & pemanfaatan digitalnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya. Oleh karena itu kajian ini mengambil judul “Analisis Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan dan Media Sosial Studi Kasus pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan pemanfaatan digitalisasi di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial oleh anggota di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.
3. Apa saja kendala dan upaya dalam penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan bagian yang menjelaskan arah serta hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun maksud penelitian menggambarkan tujuan umum yang akan dicapai dalam kajian ini sedangkan tujuan penelitian menjelaskan suatu tujuan yang spesifik yang sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan. Adapun maksud dan tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari kajian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial pada

digitallisasi koperasi melalui kajian studi kasus pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kajian penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan dan pemanfaatan digitalisasi di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial oleh anggota di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.
3. Untuk menganalisis kendala dan upaya dalam penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.

IKOPIN University

BAB II

TINJAUAN TEORI & KEADAAN UMUM KOPERASI

2.1. Pendekatan Perkoperasian

Perkoperasian merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, **"Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi"**.

Berdasarkan pernyataan tersebut dijelaskan bahwa perkoperasian merupakan segala sesuatu yang membahas mengenai koperasi meliputi tata kelola, organisasi, dan aktivitas operasional koperasi yang dijalankan dari mulai pembentukan koperasi, pengelolaan koperasi dan pengembangan koperasi.

2.1.1. Jatidiri Koperasi

Jati diri merupakan parameter untuk mengukur suatu koperasi berada dijalur yang benar atau tidak (Burhanudin, 2024:4). Berdasarkan pernyataan tersebut jati diri dapat dijelaskan sebagai ukuran yang membedakan antara koperasi dan non koperasi. Sugiyanto, et. al, (2024:3) menjelaskan bahwa karakteristik koperasi dapat dijelaskan dalam bentuk jati diri, yang terdiri dari definisi, nilai dan prinsip koperasi sebagai aturan main organisasi.

Menurut Hanel (dalam Sugiyanto, et. al, 2024:5) pemahaman mengenai koperasi berdasarkan kesepakatan para ahli dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan *Essentialist*

Pendekatan ini memandang koperasi berdasar atas suatu prinsip yang membedakan dengan organisasi lain yang memuat sejumlah nilai, norma serta tujuan yang ingin dicapai koperasi meskipun karakteristik tersebut tidak selalu ditemukan sama dikoperasi. Pengertian koperasi berdasarkan pendekatan ini mengacu pada kesepakatan internasional. *International Cooperative Alliance* (ICA, 2001) (dalam Sugiyanto et al., 2024) menyatakan bahwa "Koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan ekonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis".

Berdasarkan kutipan tersebut dijelaskan bahwa koperasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya anggota. Selain itu koperasi memposisikan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelanggan sehingga anggota berperan dalam mengendalikan organisasi koperasi melalui prinsip demokrasi.

Sedangkan, *International Labor Organization* (ILO, 2002) (Sugiyanto, et. al, 2024) menyatakan bahwa "*Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking".*

Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa dalam konsep koperasi setiap anggota memberikan kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan serta bersedia menanggung risiko dan manfaaat secara seimbang. Dalam penjelasan ini menekankan pentingnya patisipasi anggota, baik dalam aspek permodalan, pengambilan keputusan, maupun dalam pembagian hasil usaha.

Berdasarkan pernyataan kedua definisi yang telah disepakati internasional tersebut dapat dijelaskan bahwa koperasi pada hakikatnya merupakan kumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tujuan yang sama melalui sebuah perusahaan yang dimiliki bersama. Selain itu merujuk pada konsep yang dijelaskan ILO, sebuah entitas harus memiliki 6 unsur utama agar dapat dikategorikan sebagai koperasi, yaitu meliputi koperasi sebagai perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang atas dasar kesukarelaan, adanya tujuan ekonomi bersama yang ingin dicapai, koperasi juga harus berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota secara demokratis, dimana anggota harus memberikan kontribusi yang adil terhadap permodalan yang dibutuhkan serta dapat menanggung risiko dan menerima manfaat secara seimbang.

a. Pendekatan Institusional

Berdasarkan pendekatan ini, definisi koperasi diihat berdasarkan aspek legalitas undang-undang yang berlaku di suatu negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa: **“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan**

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Berdasarkan kutipan tersebut dijelaskan bahwa koperasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, akan tetapi koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga seluruh aktivitas usaha dan organisasinya dijalankan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Pendekatan ini menegaskan bahwa sebuah organisasi bisa diakui sebagai koperasi jika dinyatakan secara hukum dan memiliki legalitas yang sah dari negara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan ini definisi legal sebuah koperasi tergantung pada undang-undang atau hukum yang dirumuskan oleh sebuah negara.

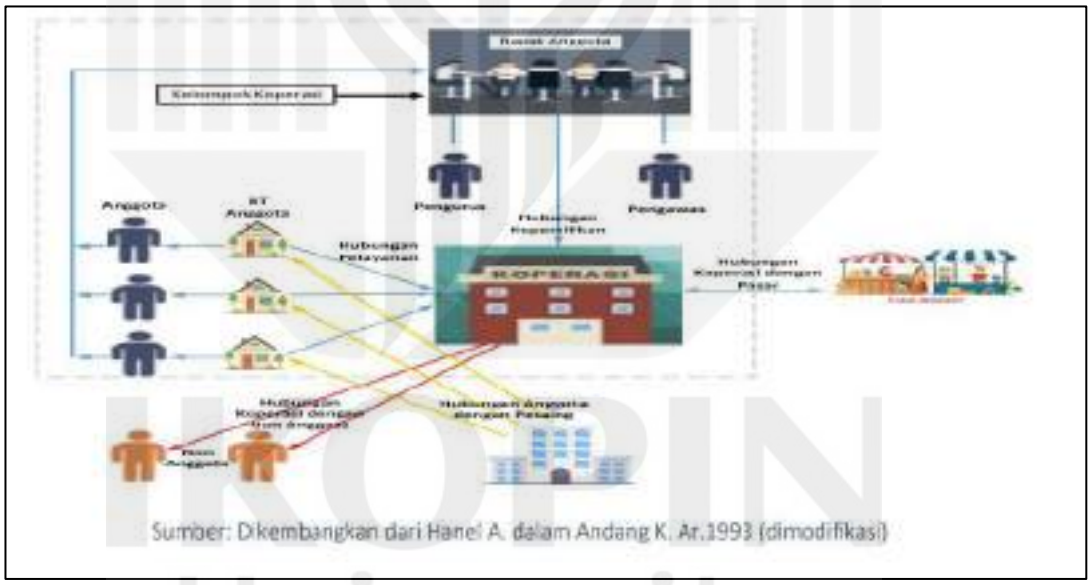
b. Pendekatan Nominalis

Pendekatan ini berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya dimana berdasarkan pendekatan ini definisi koperasi dilihat atas dasar sifat khusus dari struktur dasar tipe sosio ekonominya. Menurut Hanel (dalam Sugiyanto, et. al, 2024:7) koperasi sebagai suatu organisasi memiliki empat unsur utama, yaitu:

1. Kelompok koperasi, yaitu adanya orang yang menjalin hubungan antar sesamanya berdasarkan sekurang-kurangnya memiliki satu kepentingan yang sama.
2. Motivasi swadaya, yaitu adanya dorongan untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong.

3. Perusahaan koperasi, yaitu adanya perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota.
4. Promosi Anggota, yaitu adanya suatu hubungan atas pelayanan khusus antara perusahaan bersama dengan perusahaan rumah tangga para anggota. Dimana aktivitas usaha dikelola berdasarkan kepemilikan antar kelompok koperasi untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha angota

Adapun koperasi sebagai suatu sistem sosio ekonomi menurut hanel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Organisasi Koperasi Secara Sosio Ekonomi

Sumber : Sugiyanto, et. al, (2024:8)

Bedasarkan Gambar 2.1 dijelaskan bahwa ciri organisasi sebagai koperasi secara sosio ekonomi membentuk suatu struktur yang menggambarkan suatu sistem sosio-ekonomi yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi serta pasar dalam membentuk sistem koperasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan nominalis koperasi merupakan suatu sistem ganda yang tidak hanya bergerak pada entitas bisnis murni, melainkan sebagai suatu sistem kesatuan antara kelompok sosial anggota yang memiliki motivasi swadaya dengan perusahaan koperasi yang bertugas melakukan pelayanan demi mempromosikan kepentingan ekonomi anggota.

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat dipahami bahwa koperasi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, baik sebagai badan hukum, organisasi ekonomi, maupun sebagai suatu sistem sosial ekonomi yang berorientasi pada kepentingan anggota. Karakteristik tersebut menjadikan koperasi memilliki identitas yang berbeda dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya koperasi memerlukan nilai-nilai untuk menjadi pedoman bagi anggota dalam menjalankan kegiatan koperasi.

Nilai-nilai koperasi merupakan salah satu aspek penting dalam membedakan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, karena didalam nilai koperasi terkandung moral dan etika yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain (Sugiyanto, et. al, 2024: 9). Adapun nilai-nilai fundamental koperasi menurut Ginanjar (2012: 10) bersifat lebih universal dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menolong diri sendiri, yaitu dalam koperasi adanya kesadaran dan kemauan anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraannya secara mandiri melalui kelompok koperasi tanpa bersandar pada bantuan pihak luar.

2. Tanggung Jawab Sendiri, yaitu adanya komitmen setiap anggota untuk memikul kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan organisasi serta risiko usaha koperasi secara bersama-sama.
3. Demokrasi, yaitu dalam pengelolaan koperasi dilakukan berdasarkan kepentingan yang sama dimana setiap individu memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan (*one man one vote*).
4. Persamaan, yaitu pengakuan bahwa seluruh anggota memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di dalam koperasi tanpa memandang latar belakang sosial maupun besaran modal yang disetor.
5. Keadilan, yaitu pembagian hak dan sanksi yang sama bagi anggota, termasuk dalam hal pembagian Sisa Hasil Usaha yang didasarkan pada keaktifan partisipasi jasa usaha masing-masing anggota.
6. Kejujuran, yaitu adanya keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi informasi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan oleh pengurus kepada seluruh anggota.
7. Solidaritas, yaitu adanya rasa kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong antar anggota untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama diatas kepentingan individu.

Selain adanya nilai-nilai koperasi yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi. Adapun koperasi juga memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam kegiatannya (Ginanjar, 2012).

Dengan adanya prinsip tersebut maka kegiatan operasional koperasi memiliki pedoman terarah.

Adapun prinsip-prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya dalam keanggotaan koperasi bersifat secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain serta terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya dalam proses pengelolaan koperasi dilakukan secara bersama-sama dimana hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam proses pengambilan keputuan koperasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Artinya dalam hal pengalokasian sisa hasil usaha tidak didasarkan pada besarnya simpanan, melainkan dihitung secara proporsional berdasarkan tingkat partisipasi transaksi ekonomi anggota terhadap koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya modal yang ada didalam sebuah koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu imbal hasil atau bunga atas modal yang disetor dibatasi secara wajar dengan kemampuan koperasi.

5. Kemandirian, prinsip ini menjelaskan bahwa dalam hal pemodalan, pengendalian, dan pengawasan koperasi harus dilakukan secara mandiri oleh anggota tanpa ada campur tangan pihak lain dalam pengelolaannya.
6. Pendidikan Perkoperasian, artinya koperasi perlu melakukan pengembangan organisasi melalui pendidikan koperasi bagi angota, sehingga koperasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki wawasan yang luas mengenai sistem dan tata kelola perkoperasian.
7. Kerja sama antar Koperasi, artinya koperasi perlu membangun kerjasama dengan koperasi lain untuk memperkuat posisi ekonomi koperasi. Bentuk kerja sama dapat dilakukan baik dengan sesama koperasi sejenis maupun melalui kerjasama gabungan koperasi yaitu membentuk koperasi sekunder.

2.1.2. Tujuan, Fungsi dan Peran

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta berperan aktif dalam membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraaan bersama, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Adapun Fungsi dan Peran Koperasi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 4 yaitu:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya koperasi memerlukan perangkat organisasi koperasi agar setiap fungsi dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Pasal 21 perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

a. Rapat Anggota

   Rapat anggota dalam koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Dimana rapat anggota ini berfungsi sebagai tempat bagi anggota untuk menetapkan suatu kebijakan, mengambil sebuah keputusan dan melakukan evaluasi kinerja pengelolaan koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

b. Pengurus

Pengurus merupakan orang yang mengelola koperasi meliputi ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota melalui RAT dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan organisasi dan aktivitas usaha koperasi.

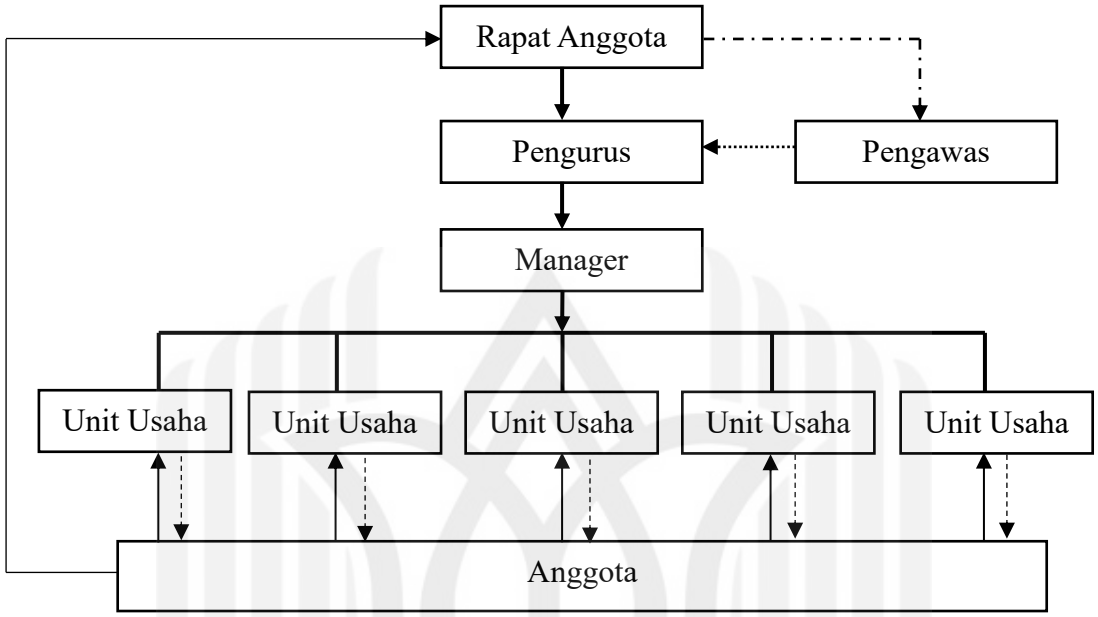
c. Pengawas

Pengawas merupakan orang yang mengawasi aktivitas koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota serta bertanggungjawab penuh pada rapat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dijalankan oleh pengurus.

2.1.4. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi mencerminkan susunan, isi dan ruang lingkup organisasi koperasi. Serta melalui struktur organisasi posisi, fungsi, tugas dan kewajiban dapat digambarkan secara jelas, termasuk mengenai hubungan koordinasi serta pertanggungjawaban antarperangkat dalam organisasi. Adapun landasan pembuatan struktur organisasi koperasi menurut (Kemenkop dan UKM, 2010) yaitu:

a. Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
c. Keputusan Rapat.



Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Koperasi

Sumber:Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Keterangan:

- Garis komando
- Garis pengawas
- Garis pelayanan
- Garis partisipasi anggota sebagai pelanggan dan pemilik
- Garis pengangkatan

2.1.5. Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 6 menyatakan bahwa jenis koperasi itu didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Adapun jenis-jenis koperasi menurut Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi Pasal 6 Ayat 3 yaitu:

1. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang beranggotakan para produsen, yang kegiatan usahanya berfokus pada penyediaan bahan baku bagi anggotanya untuk mendukung proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi
2. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usahanya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan kehidupan sehari hari bagi anggotanya.
3. Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usahanya mempromosikan, mendistribusikan serta memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggotanya.
4. Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berfokus pada penyediaan layanan jasa, seperti jasa transportasi, pendidikan, kesehatan, maupun teknologi.
5. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana berupa simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada para anggota.
6. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dalam lingkup pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa atau kelurahan guna mengintegrasikan berbagai unit usaha komunitas lokal dalam satu wadah koperasi.
7. Jenis lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau merupakan yang dibentuk berdasarkan program pemerintah.

2.1.6. Usaha Koperasi

Usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama operasional koperasi bukanlah sekedar mengejar keuntungan melainkan fokus utama koperasi yaitu bagaimana koperasi mampu menyediakan unit usaha yang relevan dengan anggota.

Perusahaan koperasi adalah komponen organisasi koperasi yang berfungsi sebagai pelaksana dari setiap keputusan ekonomi yang ditetapkan oleh organisasi koperasi (Arifin, 2013). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perusahaan koperasi merupakan komponen dari organisasi koperasi yang memiliki fungsi sebagai pelaksana dari keputusan yang telah ditetapkan organisasi koperasi, dengan kata lain perusahaan koperasi bertugas untuk mengelola sumber daya koperasi secara profesional dan efisien guna mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan anggotanya.

2.1.7. Manfaat Berkoperasi

Koperasi merupakan instrumen ekonomi kerakyatan yang memiliki berbagai fungsi, yakni sebagai salah satu badan penggerak kesejahteraan ekonomi anggota. Dalam praktiknya manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya terdiri dari dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi bagi anggota sering disebut juga dengan istilah promosi ekonomi anggota, yang memiliki pengertian yaitu untuk meningkatkan pelayanan koperasi dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi. Dalam praktiknya, menurut Wahyudin & Hidayat (2022) manfaat berkoperasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1) Manfaat Ekonomi Langsung

Yaitu manfaat yang diperoleh oleh secara langsung pada saat anggota melakukan transaksi secara langsung dengan koperasi.

2) Manfaat Ekonomi Tidak langsung

Yaitu manfaat yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadi transaksi, tetapi manfaat berupa sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota yang diperoleh dikemudian hari pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban koperasi selama satu periode.

2. Manfaat Non Ekonomi

Selain memberikan manfaat ekonomi, koperasi juga memberikan manfaat non ekonomi yang bisa disebut juga sebagai manfaat sosial. Manfaat ini menggambarkan hal dirasakan oleh anggota koperasi seperti tingkat kepuasan. Selain itu juga manfaat sosial koperasi bisa dilihat dari seberapa mampu koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

2.1.8. Asas Kekeluargaan dalam Koperasi

Asas kekeluargaan menjadi sebuah landasan utama dalam proses penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya kebersamaan, gotong royong, saling membantu, tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan koperasi. Melalui asas kekeluargaan, hubungan antar anggota tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dibangun atas dasar solidaritas dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha yang mengutamakan kepentingan anggota dibandingkan kepentingan individu. Dalam koperasi anggota berkedudukan sebagai pemilik dan pelanggan sehingga setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan koperasi.

Revrisond Baswir (dalam Aryanti, et. al, (2018) menjelaskan bahwa asas kekeluargaan mencerminkan adanya rasa kesadaran dari hati nurani manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi oleh semua dan untuk semua. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengawasan dari seluruh anggota koperasi dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Asas kekeluargaan mencakup semangat kerjasama dan tolong-menolong yang dilakukan secara sadar untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penerapan asas kekeluargaan dapat dilihat melalui adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif anggota, pembagian manfaat secara adil, serta tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan

koperasi. Adapun dalam penerapan asas kekeluargaan dalam operasi dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk yaitu:

1. Musyawarah dan Demokrasi Anggota

   Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa dipengaruhi oleh jumlah modal yang dimiliki.

2. Kerjasama dan Gotong Royong

   Anggota saling membantu dalam menjalankan kegiatan koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Semangat gotong royong ini menjadi salah satu ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

3. Tanggung Jawab Bersama

   Seluruh anggta memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan maupun permasalahan yang dihadapi koperasi. Oleh karena itu, keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan koperasi sangat diperlukan.

4. Keadilan Dalam Pembagian SHU

   Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan.

Perkembangan teknologi digital dapat membawa perubahan pada pola hubungan antar anggota koperasi. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilaksanakan melalui media digital, seperti rapat daring, aplikasi koperasi, dan platform komunikasi digital. Kondisi tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan dan penyebaran informasi, namun disisi lain dapat

mengurangi intensitas interaksi tatap muka yang selama ini menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar anggota.

Dalam proses digitalisasi, keberadaan teknologi perlu dipandang sebagai alat pendukung yang dapat memperkuat pelaksanaan atas asas kekeluargaan. Pemanfaatan teknologi yang disertai dengan partisipasi aktif anggota, komunikasi yang terbuka, dan pengambilan keputusan yang demokratis dapat membantu menjaga nilai-nilai kekeluargaan tetap hidup ditengah perubahan pola interaksi anggota. Dengan demikian, esensi asas kekeluargaan tetap dapat dipertahankan meskipun koperasi mengalami transformasi menuju sistem yang lebih digital.

2.2. Pendekatan Partisipasi Anggota dalam Koperasi

Sebagai badan usaha yang melandaskan kegiatannya pada ekonomi kerakyatan, keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada kontribusi aktif para anggotanya. Tanpa adanya partisipasi dari anggota, kegiatan usaha maupun organisasi koperasi tidak akan berjalan secara optimal

Menurut Ropke (2012:53) partisipasi diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang menemukan dan mengimplementasikan ide-ide/gagasan koperasi. Partisipasi anggota bukan hanya bagian penting tapi juga merupakan sebuah alat dalam pembangunan koperasi. Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa.

Partisipasi anggota adalah keterlibatan anggota di dalam organisasi dan perusahaan koperasi, baik didalam kedudukannya sebagai pemilik maupun sebagai

pelanggan (Arifin, 2013: 149). Berdasarkan penjelasan tersebut partisipasi anggota dapat diartikan kedudukannya dalam koperasi yaitu anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan atau memiliki peran identitas ganda (*dual identity*)**.**

1. Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik

Partisipasi anggota sebagai pemilik dapat ditunjukkan bahwa anggota terikat oleh sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap koperasi, seperti menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan modal lainnya, serta anggota sebagai pemilik memiliki kewajiban untuk menghadiri rapat anggota dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

2. Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan

Partisispasi anggota sebagai pelanggan ditunjukkan melalui keaktifan anggota dalam memanfaatkan atau menggunakan produk, jasa, atau layanan usaha yang disediakan koperasi. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai pasar utama yang menggerakan kegiatan bisnis koperasi dalam mencapai kesejahteraan bersama.

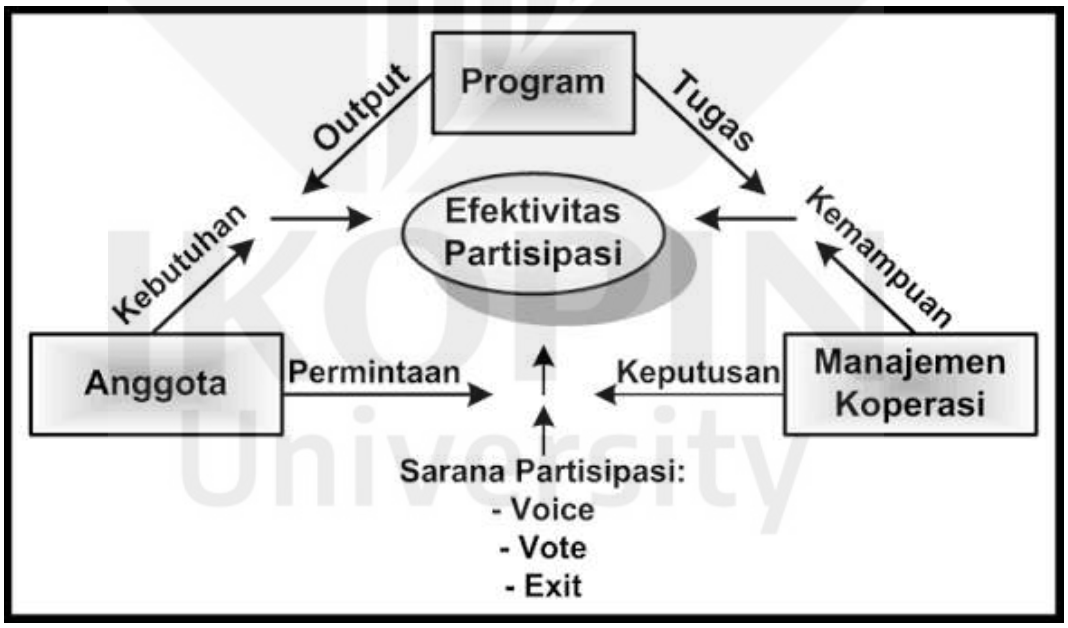
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi anggota merupakan suatu bagian yang sangat penting guna mencapai keberhasilan koperasi. Tinggi rendahnya partisipasi anggota, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa koperasi, akan mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan dan menjaga keberlanjutan usaha. Namun, tingkat partisipasi setiap anggota tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri anggota maupun dari lingkungan koperasi.

Adapun menurut Pratami, et. al, (2023) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota mengenai nilai, prinsip, serta kegiatan perkoperasian yang dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam berpartisipasi pada koperasi.
2. Kualitas pelayanan koperasi, yaitu kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga dapat mendorong keterlibatan anggota.
3. Motivasi anggota, yaitu dorongan yang dimiliki anggota untuk berpartisipasi dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi maupun non-ekonomi dari koperasi.
4. Kepuasan anggota, yaitu tingkat kepuasan anggota terhadap perkembangan dan kinerja koperasi. Semakin baik kemajuan yang dicapai koperasi, semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan anggota sehingga dapat meningkatkan partisipasinya.
5. Tingkat kepercayaan anggota, yaitu keyakinan anggota terhadap pengelolaan koperasi baik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, maupun kemampuan pengurus dalam menjalankan koperasi.
6. Dan lingkungan usaha, yaitu kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas koperasi, seperti pengembangan ekonomi, persaingan usaha, serta perubahan teknologi yang berdampak pada tingkat partisipasi anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi anggota dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari karakteristik anggota maupun dari kondisi koperasi itu sendiri. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi. Selain dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, partisipasi anggota juga dapat dipahami melalui bentuk respon anggota terhadap kondisi dan kinerja koperasi.

Adapun berikut alat partisipasi yang dapat digunakan anggota koperasi dalam mencapai pengambilan keputusan dalam perusahaan koperasi yang menggambarkan permintaan mereka adalah voice, vote, exit. Unsur-unsur tersebut telah diperkenalkan oleh A.C Hirscman (1970) dalam Ropke (2012:54). Berikut gambar model kesesuaian partisipasi dalam koperasi:



Gambar 2.3 Model Kesesuaian Koperasi

Sumber: Ropke (2012:54)

Berdasarkan Gambar 2.3 Ropke (2012) menjelaskan bahwa anggota koperasi memiliki tiga alat utama yang digunakan anggota koperasi untuk berpartisipasi. Melalui *voice* anggota koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan cara bertanya, memberi atau mencari informasi, maupun dengan mengajukan ketidaksepakatan dan kritik. *Vote* merupakan hak anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui penggunaan hak suara dalam rapat anggota. Sementara itu, *exit* merupakan hak anggota untuk mengakhiri keanggotaannya apabila koperasi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan atau harapan anggota. Ketiga alat partisipasi tersebut menunjukkan bahwa anggota memiiki peran yang aktif dalam mempengaruhi arah dan perkembangan koperasi. Keaktifan anggota tersebut pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesesuaian antara kebutuhan anggota dengan program yang disediakan koperasi.

Berdasarkan konsep model fit yang dijelaskan oleh Ropke (2012) anggota memiliki kebutuhan dan permintaan terhadap koperasi. Sedangkan koperasi melalui program yang dijalankannya menyediakan sebuah *output* yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Oleh karena itu, efektivitas keterlibatan anggota tidak hanya ditentukan oleh adanya kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana koperasi dapat menyediakan program yang mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Dalam penelitian ini, fit model yang menjadi fokus kajian adalah menekankan pada hubungan antara anggota dengan program koperasi yaitu berupa proses

program digitalisasi. Anggota memiliki kebutuhan dan harapan terhadap koperasi, baik dalam memperoleh informasi, komunikasi, maupun memperoleh kemudahan dalam menggunakan layanan dan melakukan transaksi keuangan.

Sementara itu, koperasi perlu menyediakan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan anggota. Dalam kajian ini, program koperasi yang dibahas merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital, khususnya digitalisasi transaksi keuangan dan media sosial. Adanya digitalisasi dalam sistem transaksi keuangan dapat memberikan kemudahan untuk anggota dalam proses transaksi dan pelayanan keuangan sedangkan media sosial dapat menjadi sebuah alat dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi, serta dapat memberikan informasi mengenai kegiatan dan layanan koperasi kepada anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model kesesuaian (*fit model*) dalam penelitian ini difokuskan pada kesesuaian antara kebutuhan anggota dengan program koperasi dalam bentuk digitalisasi. Pada KDMP Cileunyi Wetan, digitalisasi transaksi keuangan dan media sosial menjadi sebuah sarana dalam mendukung kebutuhan anggota dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, melakukan transaksi dan mengakses layanan koperasi. Oleh karena itu, pemanfaatan program digital oleh anggota menjadi penting dalam mengukur sejauh mana program yang disediakan koperasi telah sesuai dengan kebutuhan anggota dan mendukung tingkat partisipasi mereka. Dengan demikian hal tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam mengkaji penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial oleh anggota KDMP Cileunyi Wetan.

2.3. Pendekatan Digitalisasi dalam Perkoperasian

Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara organisasi menjalankan aktivitas operasional, memberikan layanan, serta membangun hubungan dengan para anggotanya. Sebagai salah satu badan yang berlandaskan nilai kebersamaan dan partisipasi anggota, koperasi juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap mampu memenuhi kebutuhan anggotanya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai digitalisasi dalam perkoperasian menjadi penting untuk melihat bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam mendukung aktivitas dan pengembangan koperasi di era digital.

International Cooperrative Alliance (2019) (dalam Ikhsan et al., 2025: 15) menyatakan transformasi digital dalam konteks koperasi diartikan sebagai penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar dan memperkuat hubungan anggota tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dan prinsip koperasi.

Hal tersebut menegaskan bahwa tranformasi digital pada koperasi merupakan salah satu bentuk adaptasi koperasi terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang. Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, mempercepat proses administrasi, mempermudah penyebaran informasi serta dapat memperluas jangkauan usaha dan pasar yang dimiliki. Selain itu, penggunaan teknologi digital dapat membantu koperasi dalam menghadapi adanya perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

Dengan demikian tranformasi digital dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian koperasi terhadap adanya perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai yang menjadi landasan koperasi. Dengan adanya teknologi diharapkan dapat memperkuat fungsi koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Adanya digitalisasi bukan bertujuan mengubah esensi koperasi melainkan memperkuat kapasitas koperasi dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan anggota ditengah ekosistem bisnis yang semakin kompleks.

Di era modern saat ini, transformasi digital bukan lagi sebagai tren atau sekedar pilihan bagi koperasi, melainkan menjadi sebuah keharusan untuk koperasi agar bisa mempertahankan relevansi dan daya saingnya ditengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperluas layanan agar koperasi dapat berdaya saing sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi perlu segera mengadopsi teknologi digital (Ikhsan et al., 2025:15).

Dalam hal ini, transformasi digital bukan hanya sekedar upaya modernisasi melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan agar tetap relevan ditengah pesatnya perubahan zaman. Dalam proses transformasi digitalisasi koperasi tentunya sangat berkaitan dengan istilah modernisasi dan digitalisasi. Kedua istilah tersebut memiliki cakupan dan penerapan makna yang berbeda, meskipun keduanya saling melengkapi dalam upaya memajukan organisasi.

Modernisasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “Modo” dan “Ernus”. Modo memiliki arti cara dan ernus memiliki arti masa kini. Jadi modernisasi merupakan sebuah proses menuju masa masa kini atau sebuah proses dari era tradisional ke era yang kekinian atau masa kini. Modernisasi merupakan sebuah proses perubahan sosial yang menggarah menuju kondisi yang lebih maju, ditandai dengan adanya pergeseran pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi lebih mengutamakan cara-cara berfikir yang rasional, efektif dan berfokus pada kemajuan serta pemanfaatan teknologi (Hasanah et al., (2023)

Modernisasi pada koperasi merupakan sebuah proses perubahan pola pikir, budaya kerja, dan sistem tata kelola organisasi secara menyeluruh agar menjadi lebih profesional, rasional, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Upaya modernisasi berfokus pada perbaikan aspek sumber daya manusia, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan penciptaan peraturan internal yang relevan dengan kondisi ekonomi kekinian. Dengan kata lain, modernisasi adalah proses perubahan dalam organisasi secara menyeluruh untuk menjadi lebih maju.

Sejalan dengan hal tersebut Ikhsan & Hidayat (2023) menjelaskan bahwa koperasi modern merupakan sebuah koperasi yang mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan operasionalnya serta memiliki akses terhadap sumber pemodalan yang besar dan pasar sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang besar untuk anggotanya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa salah satu upaya modernisasi koperasi adalah

dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas operasional koperasi.

Proses pemanfaatan teknologi tersebut disebut digitalisasi. Menurut Ramadhani, et. al, (2024) Digitalisasi merupakan sebuah proses konversi data atau informasi yang sebelumnya berbentuk analog menjadi digital. Digitalisasi koperasi dapat diwujudkan melalui penerapan sistem informasi, media komunikasi digital, pengelolaan data angggota serta berbagai penerapan teknologi digital lainnya yang mendukung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasional dan pelayanan koperasi.

Hubungan antara digitalisasi dan modernisasi saling melengkapi yang mana digitalisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan dalam proses modernisasi koperasi. Namun, digitalisasi yang dipaksakan tanpa didasari oleh semangat modernisasi seringkali berujung pada kegagalan. Sebaliknya, koperasi tidak dapat dikatakan sepenuhnya modern pada saat ini apabila masih mengabaikan perangkat digital dalam melayani anggotanya. Oleh karena itu, digitalisasi dan modernisasi harus berjalan beriringan dari proses digitalisasi. Dengan demikian proses digitalisasi dan modernisasi sangat berkaitan dengan proses transformasi digital koperasi.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi digital dalam kegiatan koperasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek pengelolaan organisasi dan pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu untuk memahami mengenai bagaimana penerapan digitalisasi

dalam perkoperasian secara lebih dalam perlu diketahui ruang lingkup digitalisasi yang menjadi bagian proses transformasi koperasi diera digital.

Ikram (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi dalam perkoperasian merupakan bagian dari sebuah strategi manajemen yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses modernisasi tata kelola dan layanan koperasi. Pemanfaatan teknologi tersebut mencakup pengelolaan data anggota, pencatatan transaksi, layanan simpan pinjam, pelaporan keuangan, komunikasi, serta pemasaran digital. Digitalisasi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan internal koperasi, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudahan akses anggota, transparansi, serta mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan anggota koperasi

Sejalan dengan pernyataan tersebut Nashoha, et. Al, (2024) juga menjelaskan bahwa transformasi digital dalam perkoperasian dapat dilakukan melalui pemanfaatan perangkat lunak akuntansi, sistem informasi anggota, aplikasi simpan pinjam, serta platform digital untuk mendukung pemasaran produk. Berdasarkan bentuk pemanfaatan teknologi digital tersebut, adapun ruang lingkup digitalisasi dalam perkoperasian meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Digitalisasi Tata Kelola Koperasi

Aspek ini berfokus pada modernisasi manajemen internal dan administrasi organisasi. Ruang lingkup ini mencakup penerapan sistem pencatatan data, manajemen pengarsipan berbasis digital, hingga pelaporan kinerja pengurus secara berkala. Adapun dengan adanya digitalisasi tata kelola internal menjadi rapi dan

transparan, hal tersebut dapat menjadi fondasi utama organisasi dalam mempermudah proses pelayanan kepada anggota.

2. Digitalisasi Pelayanan Anggota

Aspek ini berfokus pada proses transformasi pelayanan untuk memberikan kemudahan akses bagi anggota. Adapun ruang lingkup ini mencakup digitalisasi dalam proses pendaftaran anggota baru secara daring, pengajuan permohonan pinjaman mandiri, hingga kemudahan dalam memantau hak-hak keanggotaan seperti perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui aplikasi tanpa harus melakukan proses pengantrian dikantor koperasi.

3. Digitalisasi Transaksi Keuangan

Aspek ini berfokus pada proses efisiensi dalam sektor transaksi keuangan yang menjadi salah satu hal penting bagi koperasi. Adapun ruang lingkup pada aspek ini mencakup penerapan sistem pembayaran digital seperti (QRIS) pada unit usaha, serta proses otomatisasi pencatatan simpanan dan pinjaman. Hal ini tidak hanya mempercepat perputaran uang, tetapi juga dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

4. Digitalisasi Usaha dan Pemasaran

Aspek ini berfokus pada upaya koperasi untuk membuka peluang bagi koperasi dalam memperluas pasar dan daya saing unit bisnis yang dimilikinya. Adapun ruang lingkup tersebut mencakup dalam proses pemanfaatan platform digital seperti *marketplace*, serta strategi pemasaran digital untuk mengenalkan

produk-produk unggulan koperasi maupun produk hasil karya anggotanya ke pasar yang lebih luas.

5. Digitalisasi Komunikasi dan Partisipasi anggota

Ruang lingkup dalam aspek ini mencakup dalam proses penyediaan saluran komunikasi resmi berbasis digital melalui media sosial, pelaksanaan forum diskusi daring, hingga sistem pemungutan suara elektronik untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Aspek ini memastikan prinsip demokrasi dan nilai kekeluargaan tetap berjalan dinamis diruang digital, meskipun para anggota tidak melakukan tatap muka secara langsung.

Kelima ruang lingkup tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan teknologi dapat membentuk sistem koperasi yang ideal dan efisien. Meskipun demikian, proses digitalisasi di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Untuk mengukur tingkat keberhasilan proses digitalisasi maka kita bisa melihat bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi koperasi dalam proses digitalisasi.

Dalam menjalankan proses digitalisasi tentunya koperasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Ikhsan, et. Al, (2025) menjelaskan bahwa tantangan dan hambatan dalam koperasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

   Kurangnya akses terhadap perangkat keras yang memadai, jaringan internet yang tidak stabil, serta tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi menjadi

sebuah kendala besar. Infrastruktur yang tidak memadai ini dapat menyebabkan proses digitalisasi berjalan lambat dan tidak efisien.

2. Literasi Digital yang Rendah

   Kesenjangan keterampilan digital dikalangan anggota dan pengurus menjadi penghambat yang signifikan. Dimana tanpa adanya literasi digital, maka penggunaan teknologi digital tidak akan bisa digunakan secara optimal.

3. Kekhawatiran Keamanan Data

   Munculnya risiko peretasan, penyalahgunaan informasi serta kerentanan privasi data anggota seringkali dapat menimbulkan keraguan. Adanya perasaan tidak nyaman tersebut akan menjadi hambatan psikologis bagi anggota untuk beralih ke platform digital.

4. Pendanaan dan Biaya Implementasi

   Proses transformasi digital membutuhkan biaya yang cukup besar, dimana mencakup biaya pengembangan sistem, pemeliharaan perangkat, serta pelatihan SDM. Bagi banyak koperasi, keterbatasan modal menjadi sebuah alasan utama dalam tertundanya proses pengadopsian teknologi guna menjaga kesehatan arus kas operasional perusahaan.

2.4. Pendekatan Komunikasi dalam Koperasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam aktivitas koperasi, karena komunikasi menjadi sarana penyampaian informasi, gagasan, pendapat maupun kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan koperasi. Melalui komunikasi yang baik, hubungan antar anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi dapat terjalin secara efektif sehingga tujuan koperasi dapat dicapai dengan baik.

Menurut Effendy (2009) komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberikan pemahaman yang sama. Dalam koperasi, komunikasi menjadi sebuah media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, koordinasi, dan kerja sama antar anggota guna mendukung keberlangsungan organisasi serta pencapaian tujuan bersama.

Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjalin antar anggotanya. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi anggota, memperkuat rasa memiliki terhadap koperasi, serta mendorong keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, rendahnya partisipasi anggota, hingga berkurangnya kepercayaan terhadap koperasi.

Menurut Rustan & Hakki (2017) terdapat beberapa elemen komunikasi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Sumber (Komunikator), yaitu pihak yang menyampaikan pesan.
2. Encoding, yaitu kegiatan yang dilakukan komunikator untuk menterjemahkan ide pikirannya agar dapat diterima oleh komunikan.
3. Pesan, yaitu informasi, gagasan, atau pendapat yang disampaikan.
4. Media/Saluran, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
5. Decoding, yaitu kegiatan untuk menginterpretasikan pesan-pesan yang diterima.

6. Penerima (Komunikan), yaitu pihak yang menerima pesan.
7. Umpan balik (Feedback), yaitu tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan.
8. Gangguan, yaitu hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak tersampaikan atau tidak selalu lancar.

Dalam koperasi, elemen-elemen tersebut dapat terlihat ketika pengurus menyampaikan informasi mengenai program kerja, laporan keuangan, maupun kebijakan koperasi kepada anggota melalui rapat anggota, media sosial, aplikasi digital, atau media komunikasi lainnya. Anggota kemudian memberikan tanggapan, saran maupun kritik sebagai bentuk umpan balik terhadap informasi yang diterima.

Selain sebagai proses penyampaian pesan, komunikasi dalam koperasi juga membentuk pola hubungan antar anggota. Menurut Hidayat (2022), Pola komunikasi merupakan sebuah pola atau bentuk hubungan dua orang atau lebih yang berkaitan dengan proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi yang diterapkan dalam koperasi berpengaruh terhadap kelancaran penyampaian informasi, partisipasi anggota, serta kualitas hubungan sosial yang terjalin dalam organisasi.

Adapun pola komunikasi yang umum ditemukan dalam koperasi meliputi:

1. Pola Komunikasi Vertikal

   Pola komunikasi vertikal terjadi antara pengurus dengan anggota atau sebaliknya. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi,

kebijakan, laporan pertanggungjawaban, serta aspirasi anggota kepada pengurus koperasi.

2. Pola Komunikasi Horizontal

   Pola komunikasi horizontal terjadi antar anggota yang memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi. Pola komunikasi ini berfungsi untuk mempererat hubungan sosial, bertukar informasi, sera dapat meningkatkan kerja sama dalam berbagai kegiatan koperasi.

3. Pola Komunikasi Dua Arah

   Pola komunikasi dua arah memungkinkan terjadinya timbal balik antara pihak yang menyampaikan pesan dan pihak yang menerima pesan. Dalam koperasi, pola ini terlihat dalam rapat anggota, musyawarah, diskusi, maupun forum komunikasi lainnya yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat dan menerima tanggapan.

Berdasarkan pelaksanaannya, komunikasi dalam koperasi dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

1. Komunikasi Langsung

   Komunikasi langsung dilakukan melalui pertemuan tatap muka, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), rapat pengurus, diskusi kelompok, maupun kegiatan koperasi lainnya. Bentuk komunikasi ini memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intens karena setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan secara langsung.

2. Komunikasi Tidak Langsung

   Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara media, seperti surat, telepon, surat elektronik (email), aplikasi pesan instan, media sosial, maupun platform digital lainnya. Bentuk komunikasi ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap pola komunikasi dalam koperasi. Jika sebelumnya komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka, saat ini komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai media digital yang memungkinkan anggota tetap terhubung tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Penggunaan aplikasi pesan instan, media sosial, platform rapat daring, serta aplikasi koperasi digital telah mempermudah penyampaian informasi dan koordinasi antar anggota.

Meskipun demikian, perubahan pola komunikasi tersebut juga menimbulkan tantangan diantaranya komunikasi digital tentunya cenderung dapat mengurangi frekuensi interaksi langsung yang selama ini menjadi sarana untuk membangun kedekatan emosional kebersamaan, dan semangat kekeluargaan antar anggota. Selain itu, penyampaian pesan melalui media digital berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disertai dengan komunikasi yang jelas dan efektif.

Oleh karena itu, koperasi perlu menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan komunikasi tatap muka. Pemanfaatan teknologi sebaiknya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas komunikasi tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial yang menjadi karakteristik utama koperasi. Dengan demikian,

komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi anggota, membangun kepercayaan serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam koperasi di era digitalisasi.

2.5. Pendekatan Interaksi Sosial Anggota

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang aktivitasnya tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial antar anggota. Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi, kerjasama dan partisipasi aktif dari anggotanya. Oleh karena itu, adanya interaksi sosial antar anggota menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan berkoperasi karena melalui interaksi sosial nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong dan kekeluargaan dapat diwujudkan dalan berbagai kegiatan koperasi.

Sudariyanto (2021:21) menyatakan bahwa, “Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan dan kelompok manusia”. Berdasarkan kutipan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui interaksi sosial setiap pihak dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi, mempengaruhi perilaku serta dapat membangun kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam organisasi koperasi interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting bagi anggota guna menjalin komunikasi, memperkuat hubungan sosial dan

berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Dengan adanya interaksi yang baik antar anggota dapat mendorong terciptanya rasa kebersamaan, saling percaya, dan tanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi.

Namun proses interaksi sosial tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa syarat tertentu agar dapat terjadi interaksi sosial. Menurut (Hutasoit, 2012) syarat yang harus dipenuhi agar terjadi interaksi sosial yaitu:

1) Adanya kontak sosial

Kontak sosial merupakan hubungan awal yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Kontak sosial tidak selalu dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui berbagai media komunikasi seperti telepon, surat elektronik, maupun platform digital.

2) Adanya komunikasi sosial

Komunikasi sosial merupakan sebuah proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat, atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga tercipta pemahaman yang sama. Melalui komunikasi, individu dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diterima, sehingga hubungan sosial dapat berkembang lebih lanjut.

Dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial maka hal tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial atau interaksi sosial. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial menurut Irawan (2019:2) yaitu:

1) Terdapat dua pihak atau lebih sebagai pelaku interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila melibatkan minimal dua pihak, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.
2) Terdapat komunikasi, hal tersebut merupakan sebuah proses menyampaikan gagasan, informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain.
3) Terdapat tujuan yang ingin dicapai, pada sebuah interaksi pada umumnya dilandasi dengan tujuan tertentu, hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi, menjalin kerja sama, menyelesaikan masalah maupun memenuhi kebutuhan bersama. Sehingga tujuan tersebut menjadi pendorong terjadinya interaksi antar pihak yang terlibat.

2.6. Keadaan Umum Koperasi

Keadaan umum Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan dapat diketahui melalui sejarah terbentuknya koperasi, visi dan misi organisasi, struktur kepengurusan, keanggotaan, serta kegiatan usaha yang dijalankan. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan merupakan koperasi yang dibentuk sebagai bagian dari implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pengembangan usaha berbasis potensial lokal melalui prinsip-prinsip perkoperasian.

2.6.1 Sejarah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan berlokasi di Jl. Raya Cileunyi No.445, Kp.Babakansitu, Desa/Kelurahan Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Koperasi Desa

Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) pada tanggal 17 April 2025 yang dihadiri sebanyak 21 orang terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga desa serta perwakilan masyarakat bertempat di GOR Desa Cileunyi Wetan. Melalui musyawarah tersebut disepakati perubahan Koperasi Konsumen Citra Jaya Abadi menjadi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Perubahan status koperasi dicatatkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU.0002432.AH.01.39 Tahun 2025 pada tanggal 26 Mei 2025. Selain itu, koperasi juga telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) 3204290050088 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1902240156819 sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dikembangkan meliputi gerai sembako, gerai apotek desa/obat merah, gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit simpan pinjam, gerai unit pergudangan (*clod storage/cold chain* dan logistik) serta berbagai usaha lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan dalam proses pendanaan untuk menjalankan kegiatan usahanya di support oleh KSP Citra Mandiri Jawa Barat. Untuk sistemnya pembagian hasil yaitu dengan perbandingan 60:40 yang mana 40% untuk KSP Citra Mandiri Jawa Barat dan 60% untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Hal tersebut terjadi karena KSP Citra Mandiri Jawa barat ini menjadi bapak asuh dari KDMP Cileunyi Wetan

sebagaimana instruksi dari menteri koperasi yaitu bapak Ferry Juliantono bahwa setiap koperasi yang sudah berjalan atau sudah existing harus menjadi bapak asuh bagi beberapa KDMP.

Adapun Visi dan Misi dari Koperasi Desa Merah (KDMP) Cileunyi Wetan yaitu meliputi:

1. Visi

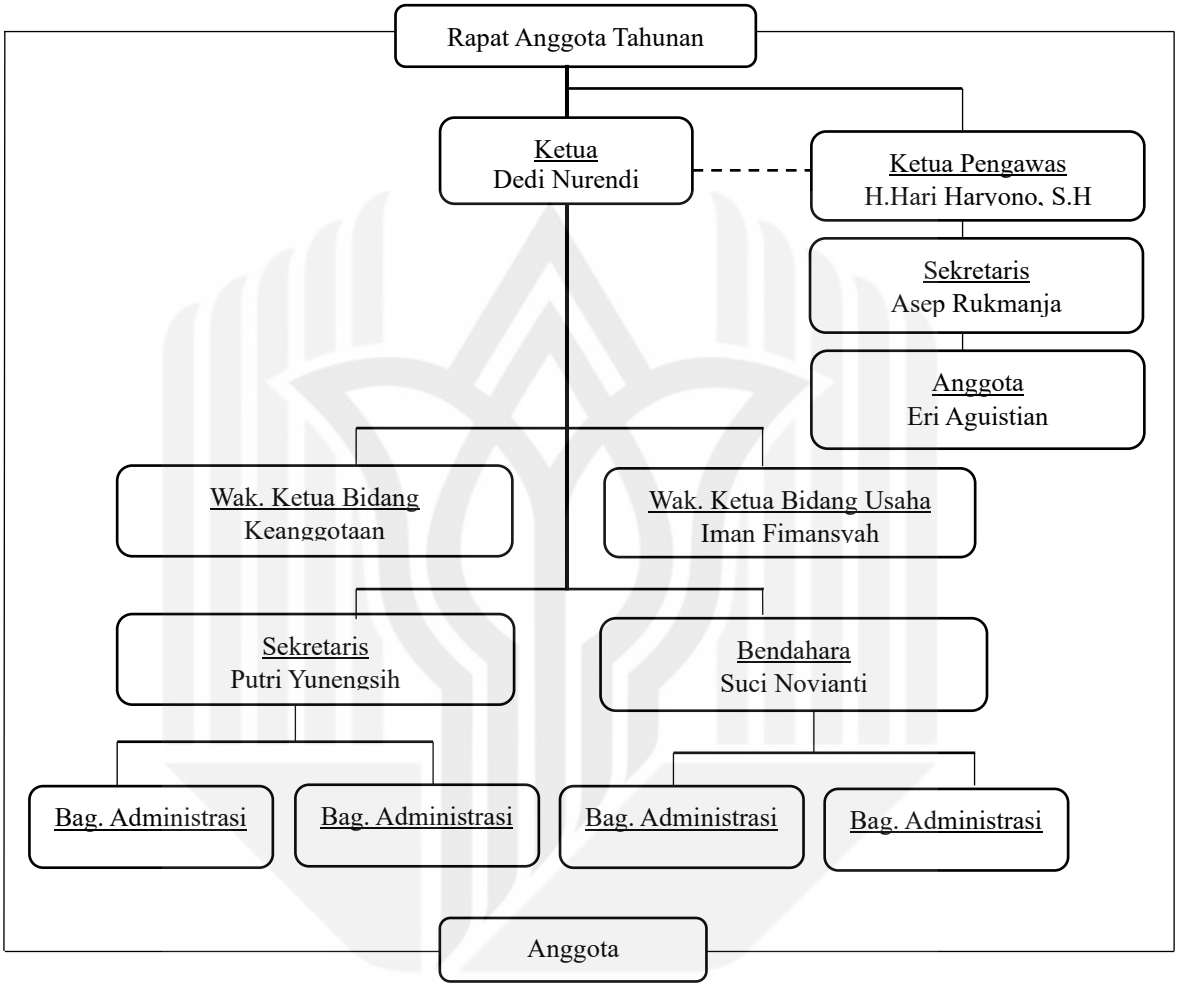
   "Menjadi unit kerja handal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat"

2. Misi
   a. Memberikan pelayanan yang profesional.
   b. Mengembangkan usaha berdasarkan potensi yang dimiliki.
   c. Membangun kerjasama dan kolaborasi ekonomi dengan berbagai pihak.
   d. Memenuhi kebutuhan anggota melalui penyediaan berbagai layanan.
   e. Memberikan solusi terbaik bagi peningkatan kesejahteraan anggota.

2.6.2 Struktur Organisasi Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya diperlukan sebuah struktur kepengurusan organisasi. Adapun berikut struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai berikut:

Struktur Organisasi KDMP Cileunti Wetan Periode 2025 s/d 2028



Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi KDMP Cileunyi Wetan

Sumber: Laporan RAT KDMP Cileunyi Wetan

Adapun rincian susunan kepengurusan periode 2025-2028 pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan yaitu:

a. Ketua : Dedi Nurendi
b. Wakil Ketua Bidang Usaha : Iman Firmansyah
c. Sekretaris : Putri Yunengsih
d. Bendahara : Suci Novianti

Adapun Susunan Pengawas terdiri atas:

a. Ketua : H. Hari Haryono, S.H
b. Sekretaris : Asep Rukmanja
c. Anggota : Eri Agustian

Dalam menjalankankan kegiatan operasionalnya, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi dan pembagian tugas masing-masing yang diatur berdasakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Struktur organisasi tersebut terdiri atas pengawas, pengurus, dan pengelola yang saling berkoordinasi dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi.

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan didukung oleh dua karyawan. Masing-masing karyawan memiliki tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dengan rincian tugas tersebut ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua koperasi dibagian kasir dan gudang, namun pengurus juga ikut serta menjalankan tugas yang sama jika ada kesibukan. Berikut daftar karyawan Koperasi Desa merah Putih Cileunyi Wetan:

Tabel 2. 1 Daftar Karyawan Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan

No	Nama	Bidang Tugas
1.	Suci Noviyanti	Karyawan Toko Koperasi
2.	Putri Yunengsih	Karyawan Toko Koperasi
3.	Adang	Karyawan Toko Koperasi
4.	Nurul Ilmi	Karyawan Toko Koperasi
5.	Dedi Nurendi	Karyawan Toko Koperasi

Sumber: Laporan RAT Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan

2.6.3 Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan

Berdasarkan data administrasi koperasi hingga akhir tahun 2025 jumlah anggota Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan mencapai 225 orang. Sebelumnya, pada saat penyusunan *company profile* yaitu sampai tanggal 19 Juni 2025 jumlah anggota tercatat sebanyak 213 orang yang terdiri atas 115 pedagang, 27 karyawan/ pegawai, dan 71 buruh. Proses pendaftaran anggota masih terus dibuka sebagai upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan koperasi. Berdasarkan data terakhir di web Simkopdes anggota KDMP Cileunyi Wetan tercatat sebanyak 311 orang. Oleh karena itu, masih perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan keanggotaan agar bisa memperluas jaringan keanggotaan.

2.6.4 Tata Kelola Usaha Koperasi

Sebagai koperasi yang dibentuk untuk mendukung perekonomian masyarakat desa, KDMP Cileunyi Wetan menjalankan beberapa unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, koperasi memiliki tujuh gerai usaha, meskipun belum seluruhnya beroperasi secara optimal. Saat ini koperasi lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada gerai sembako, sedangkan beberapa unit usaha lainnya seperti unit simpan pinjam, klinik, apotek, pupuk, dan unit usaha lainnya masih dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sumber daya dan kondisi operasional koperasi.

Untuk melihat bagaimana perkembangan kegiatan usaha tersebut, adapun berikut data perkembangan kegiatan usaha KDMP Cileunyi Wetan pada bidang usaha sembako dan lainnya:



Gambar 2.5 Omset Penjualan KDMP Cileunyi Wetan Periode 2025

Sumber: Laporan RAT KDMP Cileunyi Wetan 2025

Berdasarkan Gambar 2.5, dapat diketahui bahwa kegiatan usaha KDMP Cileunyi Wetan telah menghasilkan omset penjualan selama periode 2025. Omset penjualan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan cukup baik dan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sebelumnya (Koperasi Konsumen Citra Jaya Abadi Utama). Rata-rata perbulan dari omset penjualan sebelumnya yaitu sebesar Rp.250 juta namun saat ini rata-rata per bulan sebesar Rp.1.014.000. Dengan demikian dapat dilihat bahwa total omset selama 6 bulan sebesar Rp. 6.086.369.639.

Adanya peningkatan omset tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha KDMP Cileunyi Wetan mengalami perkembangan setelah dilakukan pengembangan kegiatan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan koperasi telah mampu menghasilkan aktivitas penjualan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Peningkatan volume penjualan tersebut dapat menjadi salah satu gambaran awal mengenai perkembangan kegiatan usaha koperasi. Namun besarnya omset

secara keseluruhan belum dapat menggambarkan hasil usaha yang diperoleh koperasi karena masih terdapat pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan operasional koperasi. Adapun untuk melihat kondisi koperasi tersebut, berikut disajikan data perkembangan pendapatan bruto, biaya usaha dan sisa hasil usaha KDMP Cileunyi Wetan:

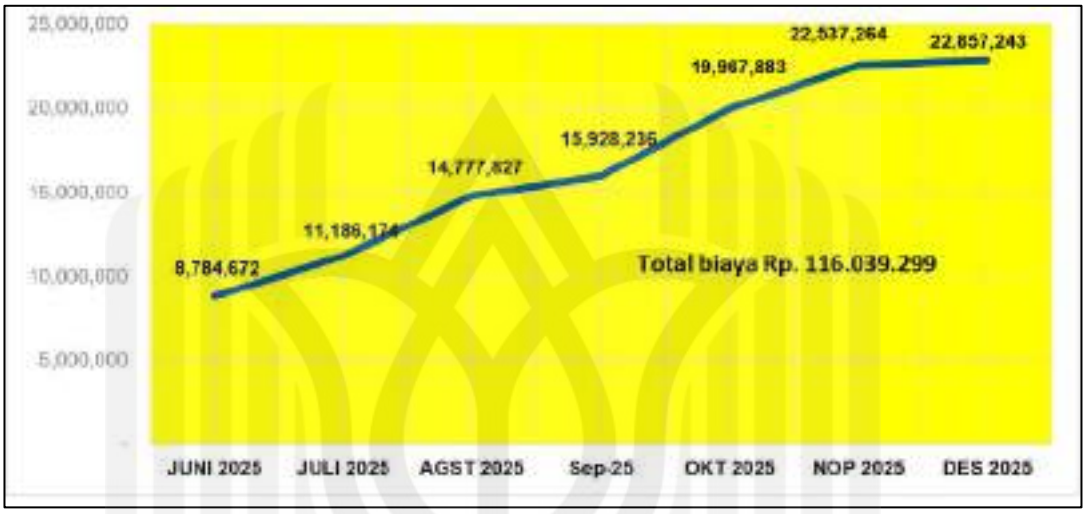


Gambar 2.6 Pendapatan Bruto KDMP Cileunyi Wetan Periode 2025

Sumber: Laporan RAT KDMP Cileunyi Wetan 2025

Berdasarkan Gambar 2.6 terlihat bahwa pendapatan bruto KDMP Cileunyi Wetan selama periode 2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Total pendapatan selama periode tersebut tercatat sebesar Rp208.651.758, kondisi tersebut menggambarkan adanya perkembangan pendapatan yang diperoleh koperasi dari kegiatan usahanya. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha koperasi semakin berkembang. Adapun selain melihat perkembangan pendapatan bruto, perkembangan kegiatan usaha juga perlu dilihat dari sisi biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi.

Berikut data perkembangan biaya yang dikeluarkan KDMP Cileunyi Wetan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya:



Gambar 2.7 Biaya-Biaya KDMP Cileunyi Wetan Periode 2025

Sumber: Laporan RAT KDMP Cileunyi Wetan 2025

Berdasarkan Gambar 2.7 terlihat bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan mengalami peningkatan yang signifikan. Total biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut tercatat sebesar Rp116.039.299. Peningkatan biaya tersebut menggambarkan adanya pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional koperasi seiring dengan berkembangnya aktivitas usaha. Dengan demikian, selain menghasilkan pendapatan, kegiatan usaha koperasi juga didukung oleh biaya yang perlu dikelola untuk mendukung keberlangsungan operasionalnya. Selain itu, untuk melihat bagaimana perkembangan sisa hasil usaha yang diperoleh berikut disajikan data perkembangan sisa hasil usaha KDMP Cileunyi Wetan pada Periode 2025:



Gambar 2.8 Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak

Sumber: Laporan RAT KDMP Cileunyi Wetan 2025

Berdasarkan Gambar 2.8 terlihat bahwa SHU sebelum pajak pada KDMP Cileunyi Wetan mengalami fluktuasi. Pada bulan Juni sampai Agustus 2025 mengalami penurunan, sedangkan pada bulan agustus sampai september konstan atau stabil dan pada bulan september hingga bulan desember 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan sisa hasil usaha selama periode penelitian yakni terjadi penurunan, stabil dan peningkatan pada akhir periode.

Selain itu dalam mendukung peningkatan pengelolaan usaha, KDMP Cileunyi Wetan telah menerapkan sistem digital pada proses pencatatan administrasi dan keuangan, transaksi pembayaran menggunakan QRIS, serta komunikasi dengan anggota melalui grup WhatsApp dan media sosial. Pemanfaatan teknologi digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi, mempercepat penyampaian informasi kepada anggota, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini akan uraikan mengenai hasil kajian yang diperoleh berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Hasil kajian tersebut kemudian dianalisis untuk dilakukan pembahasan sesuai fokus permasalahan yang telah dijelaskan pada identifikasi masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan dan pemanfatan digitalisasi koperasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kendala yang dhadapi dalam penerapan dan pemanfaatan digitalisasi di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan.

3.1 Identitas Informan

Informan dalam kajian ini merupakan pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan secara langung dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan bahwa informan memahami proses pelaksanaan digitalisasi serta keterlibatan anggota dikoperasi. Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam kajian ini adalah ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan yang berperan sebagai informan kunci (*Key Informant*) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Dedi Nurendi

Jabatan : Ketua

Usia : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

3.2 Bentuk Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan

Penerapan dan pemanfaatan digitalisasi pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan merupakan salah satu bentuk upaya koperasi dalam menyesuaikan kegiatan pengelolaan dan pelayanan koperasi dengan perkembangan teknologi. Dalam kajian ini, penerapan digitalisasi dilihat dari teknologi digital yang telah disediakan dan diterapkan oleh koperasi, sedangkan bentuk pemanfaatannya dilihat dari bagaimana keterlibatan anggota dalam menggunakan layanan digital, memberikan tanggapan, menyampaikan saran dan masukan, serta melakukan komunikasi dengan pengurus melalui media digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Desa Merah putih (KDMP) Cileunyi Wetan, koperasi telah menerapkan digitalisasi dalam berbagai kegiatan operasionalnya seperti pencatatan keuangan, transaksi pembayaran, serta penyampaian informasi kepada anggota melalui media digital. Penerapan digitalisasi tersebut menunjukkan adanya upaya koperasi untuk menyesuaikan kegiatan operasional dengan perkembangan teknologi.

a) Penerapan Digitalisasi dalam Tata Kelola dan Keuangan

Penerapan digitalisasi pada KDMP Cileunyi Wetan salah satunya terlihat dari adanya penggunaan aplikasi dalam proses pencatatan keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh ketua KDMP Cileunyi Wetan sebagai berikut:

"Alhamdulillah kita sudah menggunakan digitalisasi diantaranya proses pencatatan keuangan, untuk transaksi pembayaran melalui digitalisasi kita kerjasama dengan primkoppol brimob polda jabar dengan membayar aplikasi itu sebulan sekitar Rp300.000, karena melalui aplikasi itu kita bisa mengetahui catatan keuangan perharinya, laporan keuangan perbulan, pertriwulan....serta melalui

aplikasi kita bisa mengetahui jumlah barang dengan masa kadaluarsa/expirednya. jadi kita udah mulai ada digitalisasinya."

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan telah diterapkan dalam mendukung proses pencatatan keuangan, transaksi pembayaran secara digital serta penggunaan aplikasi yang bisa mengetahui jumlah persediaan dan masa kadaluwarsa barang. Dengan demikian, bentuk digitalisasi yang diterapkan di KDMP Cileunyi Wetan tidak hanya berkaitan dengan transaksi, tetapi juga digunakan dalam mendukung pengelolaan dalam kegiatan koperasi.

Hal tersebut sejalan dengan Ikram (2025) yang menjelaskan bahwa digitalisasi dalam perkoperasian merupakan bagian dari strategi manajemen yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung modernisasi tata kelola dan pelayanan koperasi. Pemanfaatan teknologi tersebut mencakup pengelolaan data, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, komunikasi dan pemasaran digital.

Jika dikaitkan dengan teori tersebut, penerapan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan menunjukkan kesesuaian karena teknologi telah digunakan untuk mendukung tata kelola dan pengelolaan keuangan koperasi. Hal tersebut juga sesuai dengan ruang lingkup digitalisasi tata kelola yang menekankan penggunaan sistem digital dalam pencatatan data, administrasi dan pelaporan organisasi.

Selain itu, penggunaan QRIS menunjukkan bahwa digitalisasi telah diterapkan pada kegiatan transaksi keuangan. Ketua KDMP menyampaikan:

"*....digitalisasi selain pembayaran ada yang pakai QRIS, sosialisasinya pakai media sosial, TikTok, WhatsApp, Instagram...*"

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa KDMP Cileunyi Wetan telah menerapkan digitalisasi transaksi keuangan dalam koperasi melalui penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Namun, keberhasilan penerapan digitalisasi tidak hanya dilihat dari ketersediaan teknologi saja akan tetapi juga berfokus pada bagaimana pemanfaatannya oleh anggota. Dengan demikian perlu kita lihat juga bagaimana teknologi tersebut bisa digunakan sebagai sarana dalam melakukan pelayanan, komunikasi, dan partisipasi anggota.

b) Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi

Selain dalam pengelolaan keuangan, KDMP Cileunyi Wetan juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam penyampaian informasi dan sosialisasi. Media yang digunakan antara lain Tiktok, Whatsapp, dan Instagram. Adapun ketua KDMP Cileunyi Wetan menyatakan sebagai berikut:

"....kita sosialisasinya pake sosial media dalam arti digital tiktok, whatsapp, instagram, itukan sebagian pada digital jadi kita harus mengikuti perkembangan zamanlah supaya bersaing."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial telah mengubah cara koperasi menyampaikan informasi kepada anggota. Informasi yang sebelumnya dapat disampaikan melalui pertemuan langsung kini dapat disampaikan melalui media digital.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan komunikasi yang dijelaskan oleh Effendy (2009) bahwa komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memperoleh pemahaman yang sama. Dalam kegiatan koperasi, komunikasi berfungsi sebagai

sarana dalam melakukan pertukaran informasi, koordinasi dan kerjasama antar anggota.

Berdasarkan penjelasan tersebut penggunaan Whatsapp, Instagram dan Tiktok dapat dilihat sebagai saluran komunikasi yang digunakan koperasi untuk menyampaikan pesan kepada anggota. Apabila dikaitkan dengan unsur komunikasi menurut Rustan & Hakki (2017) pengurus berperan sebagai komunikator, informasi mengenai kegiatan koperasi menjadi pesan, sedangkan Whatsapp dan media sosial lainnya menjadi saluran komunikasi. Anggota berperan sebagai penerima pesan yang selanjutnya dapat memberikan tanggapan sebagai bentuk umpan balik. Dengan demikian, pemanfaatan media sosial di KDMP Cileunyi Wetan tidak hanya menunjukkan penerapan teknologi, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan saluran komunikasi antara koperasi dengan anggota.

c) Perubahan Pola Komunikasi dan Interaksi Anggota

Meskipun media digital telah digunakan, komunikasi secara langsung masih dilakukan oleh koperasi. Adapun ketua KDMP Cileunyi Wetan menyatakan:

"*Bisa be to be secara langsung bisa via wa di grup, misalkan kalo ditanyakan terhadap keanggotaan bisa via whatsap digrup, tergantung orangnya kalo sibuk bisa via whatsapp pake teknologi dan itu ada adminnya dan adminnya itu yang bertugas menjawabnya....*"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi di KDMP Cileunyi Wetan tidak sepenuhnya mengalami perubahan dari komunikasi langsung ke komunikasi digital. Kedua bentuk komunikasi berjalan beriringan yang mana komunikasi melalui Whatsapp digunakan untuk memberikan kemudahan dalam

penyampaian informasi sedangkan bentuk komunikasi langsung tetap masih dilakukan sesuai kebutuhan anggota.

Hal tersebut sejalan dengan pendekatan komunikasi dalam koperasi yang membedakan antara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan melalui tatap muka sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media seperti Whatsapp dan media sosial lainnya. Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan interaksi sosial. Sudariyanto (2021) menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu maupun kelompok yang memungkinkan terjadinya komunikasi, pertukaran informasi dan kerjasama. Adapun Hutasoit (2012) menjelaskan bahwa interaksi sosial memiliki syarat berupa adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial tersebut tidak harus secara langsung tetapi dapat berlangsung melalui media komunikasi digital. Dengan demikian adanya digitalisasi tidak menghilangkan interaksi sosial antara pengurus dan anggota, tetapi mengubah sebagian media yang digunakan dalam melakukan interaksi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk penerapan dan pemanfaatan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan telah dilakukan pada beberapa aspek dari ruang lingkup digitalisasi koperasi. Dari lima aspek ruang lingkup digitalisasi yang digunakan dalam kajian ini, penerapan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan baru terlihat pada tiga apek yaitu digitalisasi tata kelola koperasi, digitalisasi transaksi keuangan dan digitalisasi komunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan masih berada dalam tahap pengembangan dan belum mencakup seluruh aspek digitalisasi koperasi, sehingga diperlukan upaya

yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan dan partisipasi anggota.

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan dan Media Sosial oleh Anggota

Pemanfaatan digitalisasi oleh anggota tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi yang disediakan koperasi, tetapi juga oleh kesesuaian layanan dengan kebutuhan anggota, kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi, pola komunikasi serta dari lingkungan koperasi. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor-faktor tersebut dapat dianalisis berdasarkan pendekatan partisipasi anggota dan model kesesuaian koperasi.

a) Kesesuaian Program Digital dengan Kebutuhan Anggota

Melalui konsep model kesesuaian koperasi yang dijelaskan oleh Ropke (2012) partisipasi anggota berkaitan dengan adanya kesesuaian antara kebutuhan anggota dengan program yang disediakan koperasi. Anggota memiliki kebutuhan dan harapan, sedangkan koperasi menyediakan program atau pelayanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam kajian ini, program koperasi yang menjadi pembahasan merupakan program digitalisasi transaksi keuangan dan media sosial. Digitalisasi keuangan diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, sedangkan media sosial diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara, anggota memberikan respon yang cukup positif terhadap adanya penerapan digitalisasi pada koperasi, meskipun dalam penggunaanya masih membutuhkan proses. Adapun ketua KDMP Cilenyi Wetan menyampaikan:

"Tanggapan dari anggota antusias cuma dalam hal penggunaanya perlu berproses, ada ketidaksiapan dalam hal perangkatnya...."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian pada awalnya antara program digital yang disediakan koperasi dengan penerimaan anggota. Anggota menunjukkan antusiasme terhadap digitalisasi, tetapi dalam pemanfaatannya belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan terkait kesiapan perangkat dan kemampuan anggota sebagi pengguna dalam memanfaatkan program tersebut.

Jika dikaitkan dengan fit model partisipasi Ropke (2012), hal tersebut menunjukkan bahwa program digital koperasi telah memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan anggota, tetapi tingkat kesesuaiannya belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa KDMP Cileunyi Wetan telah menyediakan program namun kemampuan anggota untuk menggunakan program tersebut masih menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat partisipasinya.

b) Kemampuan Anggota sebagai Faktor Pemanfaatan Digitalisasi

Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi masih beragam. Ketua KDMP Cileunyi Wetan ketika diberi pertanyaan mengenai apakah seluruh anggota sudah memanfaatkan digitalisasi sepenuhnya, beliau menyampaikan:

"Belum, karena anggota itu beragam pola pikir dan kemampuan untuk menggunakan itu bervariasi, anggota itu berbagai macam kelas yaitu kelas ibu-ibu, orang tua nah kalo pemudanya jarang..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik anggota menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan digitalisasi. Perbedaan usia dan kemampuan dalam menggunakan teknologi menyebabkan tingkat kemampuan anggota dalam mengakses dan menggunakan layanan digital tidak sama. Hal tersebut sejalan dengan Ikhsan et al. (2025) yang menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital dan kesenjangan keterampilan digital dikalangan anggota dan pengurus dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, hasil kajian memperkuat teori bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh adanya kemampuan sumber daya manusia sebagai pengguna.

c) Komunikasi sebagai Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota

Komunikasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong partisipasi anggota. Effendy (2009) menjelaskan bahwa komunikasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan koordinasi, sedangkan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki anggota terhadap koperasi. Dalam praktiknya, KDMP Cileunyi Wetan menggunakan komunikasi langsung dan whatsapp untuk berhubungan dengan anggota. Ketua menjelaskan bahwa:

"Bisa be to be secara langsung bisa via WA di grup, misalkan kalo ditanyakan terhadap keanggotaan bisa via whatsapp digrup, ada yang bisa be to be langsung jadi tergantung orangnya kalo sibuk bisa via whatsapp...."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kedua saluran tersebut menunjukkan bahwa koperasi menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi anggota. Bagi anggota yang dapat memanfaatkan layanan digital, Whatsapp menjadi sarana untuk memperoleh informasi dan menyampaikan kebutuhan. Sementara itu, komunikasi langsung tetap tersedia bagi anggota yang lebih nyaman melakukan komunikasi tatap muka. Dengan demikian, komunikasi dapat menjadi penghubung antara program digital koperasi dengan anggota. Semakin efektif informasi mengenai layanan digital disampaikan, semakin besar kemungkinan anggota dapat memahami dan memanfaatkan layanan tersebut.

d) Partisipasi Anggota dan Dukungan Lingkungan Koperasi

Ropke (2012) menjelaskan bahwa partsipasi merupakan proses ketika anggota terlibat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan koperasi, partisipasi menjadi penting karena anggota memiliki kedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dalam digitalisasi koperasi, partisipasi anggota dapat dilihat melalui keterlibatan mereka dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan koperasi. Namun, tingkat partisipasi tersebut juga dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan koperasi. Ketua KDMP Cileunyi menyatakan:

"Faktornya banyak, terutama dukungan masyarakat, anggota, pengurus, pengawas. Kebetulan ada juga beberapa faktor eksternal dan internal..... tata kelola digitalnya menyesuaikan dan ada juga dukungan dari mahasiswa dan akademisi".

Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi digital anggota tidak berdiri sendiri. Keterlibatan anggota sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari pengurus, pengawas, masyarakat serta pihak eksternal. Dengan demikian,

pemanfaatan digitalisasi dalam koperasi merupakan proses yang melibatkan hubungan antara anggota, program koperasi dan lingkungan pendukungnya.

3.4 Kendala dan Upaya dalam Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan dan Media Sosial oleh Anggota

Penerapan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kemampuan anggota dalam memanfaatkan layanan digital. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan digital anggota, ketidaksiapan perangkat, belum terlaksananya pelatihan, serta gangguan teknis. Untuk mengatasi kondisi tersebut koperasi melakukan sosialisasi, edukasi, merencanakan pelatihan, menerapkan digitalisasi secara bertahap, dan menyediakan pencatatan manual sebagai cadangan.

a. Keterbatasan Literasi Digital dan Upaya Sosialisasi

Keterbatasan kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi merupakan salah satu kendala dalam pemanfaatan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan. Berdasarkan hasil wawancara ketua KDMP Cileunyi Wetan menyampaikan bahwa:

"Belum, karena anggota itu beragam pola pikir dan kemampuan untuk menggunakan itu bervariasi..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan anggota dalam memanfaatkan teknologi digital belum merata. Hal tersebut sejalan dengan Ikhsan et al., (2025) yang menjelaskan bahwa kesenjangan keterampilan digital di antara anggota dan pengurus dapat menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi secara optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, koperasi juga berupaya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Pak Dedi selaku ketua menyampaikan bahwa:

"Kita sebenernya ga boleh bosan-bosan mengingatkan sosialisasi digitalisasi kepada anggota..."

Upaya tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah berusaha meningkatkan pemahaman anggota mengenai penggunaan teknologi digital melalui komunikasi dan sosialisasi yang harus terus dilakukan. Jika dikaitkan dengan pendekatan komunikasi, sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi dari koperasi kepada anggota agar anggota memahami layanan digital yang tersedia. Dengan demikian, komunikasi berfungsi sebagai sarana dalam meningkatkan pemahaman anggota sekaligus mendorong partisipasi dalam pemanfaatan layanan digital.

b. Keterbatasan Perangkat dan Upaya Penyesuaian

Selain keterbatasan kemampuan digital, kendala lainnya yang ditemukan adalah ketidaksiapan perangkat koperasi. Ketua KDMP Cileunyi Wetan menyampaikan:

".... ada ketidaksiapan dalam hal perangkatnya..."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi tidak hanya membutuhkan kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi tetapi juga membutuhkan adanya kesiapan perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan digital. Hal tersebut sesuai dengan teori Ikhsan et al. (2025) mengenai keterbatasan infrastruktur teknologi sebagai salah satu hambatan transformasi digital. Ketersediaan perangkat yang tidak memadai dapat menyebabkan pemanfaatan teknologi berjalan kurang optimal.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, koperasi melakukan penerapan digitalisasi secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggota. Hal

tersebut menunjukkan bahwa koperasi berupaya menyesuaikan program digital dengan kondisi pengguna. Jika dikaitkan dengan fit model yang dijelaskan Ropke, penyesuaian tersebut diperlukan agar program yang disediakan koperasi memiliki kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan anggota. Dengan demikian, penerapan digitalisasi secara bertahap merupakan bentuk penyesuaian koperasi agar layanan digital yang disediakan dapat lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh anggota

c. Pelatihan dan Upaya Pengembangan Kemampuan Anggota Belum Terlaksana

Pelatihan diperlukan untuk membantu anggota dalam memahami penggunaan layanan digital yang telah disediakan koperasi, terutama bagi anggota yang memiliki kemampuan dan pengalaman menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelatihan digital bagi anggota di KDMP Cileunyi Wetan masih belum terlaksana. Ketua KDMP Cileunyi Wetan menyampaikan:

"Belum, masih rencana kita pada saat RAT sempat sudah dicanangkan juga melalui seperti program PAG. Pelatihan dengan anggota nanti diterapkan, kita akan berproses ya nanti dianggarkan kan pelatihan itu butuh besaran snacknya, tempatnya dan lain-lain kan butuh dana juga kita perlu menyisihkan dari penghasilan"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan atau pelatihan digital bagi anggota masih belum terlaksana tapi sudah ada rencana untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa koperasi telah mengidentifikasi pentingnya peningkatan kemampuan anggota sebagai bagian dari keberhasilan digitalisasi koperasi namun koperasi juga masih terkendala dalam

pengalokasian untuk dana pelatihan sehingga memerlukan dana yang cukup besar dan perlu melakukan penyisihan terlebih dahulu dari penghasilan. Hal tersebut sejalan dengan Ikhsan et al. (2025) yang menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga memer biaya untuk pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi anggota, pelatihan menjadi suatu hal penting karena kemampuan anggota merupakan salah satu prasyarat agar anggota dapat berperan sebagai pengguna layanan koperasi. Tanpa adanya kemauan dari anggota keberadaan layanan digital belum tentu dapat menghasilkan tingkat partisipasi yang optimal.

d. Kemauan Generasi Muda dalam Berpartisipasi dalam Kegiatan Koperasi yang Rendah dan Upaya Peningkatkan Keterlibatan Anggota

Selain keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, kendala dalam pemanfaatan digitalisasi juga berkaitan dengan kemauan naggota untuk terlibat dalam kegiatan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi, tetapi juga oleh adanya kemauan dan ketertarikan untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam kegiatan koperasi, ketua KDMP Cileunyi Wetan menyampaikan:

"Belum, karena anggota itu beragam pola pikir dan kemampuan untuk menggunakan itu bervariasi, ada anggota itu berbagai macam kelas yaitu kelas ibu-ibu, orang tua nah kalo pemudanya jarang, tantangan tersebut bagaimana nanti mengedukasi kepada muda mudi dengan dibantu oleh rekan rekan

mahasisiwi, mahasiswa dari IKOPIN bagaimana mengedukasi supaya pemuda dan pemudi itu tertarik pada koperasi, kebanyakan untuk bergabung dikoperasi itu dari kalangan muda mudi kurang nah ini sebagai tantangan....."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan pemuda-pemudi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan ketertarikan dan kemauan untuk bergabung dengan koperasi. Ketua KDMP menyampaikan:

"....sebagai contoh aja anak bapak, sudah cukup di ayah saja untuk di koperasi aku tidak tertarik terhadap koperasi walaupun sekarang ada gembar gembor KDMP...."

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program KDMP dan perkembangan digitalisasi belum secara otomatis mampu menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam koperasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ketersediaan teknologi saja belum cukup untuk meningkatkan partisipasi apabila belum diikuti dengan adanya ketertarikan dan kesadaran anggota, khususnya generasi muda, terhadap manfaat koperasi.

Adapun jika dikaitkan dengan model fit Ropke (2012) menunjukkan bahwa program yang tersedia di koperasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anggota agar dapat mendorong partisipasi. Oleh karena itu, koperasi perlu berupaya untuk melakukan edukasi kepada pemuda pemudi bisa dengan melibatkan mahasiswi dan mahasiswa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan generasi muda dalam koperasi. Adapun jika dilihat dari sudut pandang komunikasi dan interaksi sosial, edukasi tersebut dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan hubungan yang lebih dekat antara koperasi dengan generasi muda.

e. Kendala Teknis dan Upaya Mempertahankan Keberlangsungan Operasional

Selain kendala yang berkaitan dengan kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi digital, penerapan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan juga menghadapi gangguan teknis. Berdasarkan hasil wawancara, ketua KDMP Cileunyi Wetan menyampaikan:

"Kendalanya ada kadang-kadang error atau mati lampu tapi masih bisa ditanggulangi....."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala teknis yang dihadapi koperasi berupa sistem yang terkadang mengalami error dan gangguan pemadaman listrik. Adapun sebagai upaya penanganan dari kondisi tersebu, koperasi masih tettap menyediakan alternatif pencatatan manual sebagai cadangan: apabila sistem digital mengalami gangguan. Ketua KDMP Cileunyi Wetan menyampaikan:

" ....Ada backupan ditulis tangan"

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem digitalisasi belum sepenuhnya menggantikan sistem manual. Penggunaaan pencatatan manual sebagai cadangan merupakan bentuk adaptasi koperasi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan operasional ketika terjadi gangguan. Jika dikaitkan dengan pendekatan interaksi sosial dan komunikasi, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa keberlangsungan hubungan koperasi dengan anggota tetap perlu dijaga meskipun terjadi gangguan pada sistem digital. Dengan kata lain, teknologi berfungsi sebagai alat bantu dalam menjalankan kegiatan koperasi, bukan sebagai satu-satunya sarana yang menentukkan berlangsungnya hubungan antara koperasi dan anggota.

Secara keseluruhan kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa persoalan utama digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan anggota sebagai pengguna. Oleh karena itu, upaya koperasi berupa sosialisasi, edukasi, pelatihan, penerapan secara bertahap serta sistem pencatatan cadangan menunjukkan bahwa proses digitalisasi masih berlangsung dalam tahap perkembangan.

Jika dibandingkan dengan teori digitalisasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi perlu disertai dengan peningkatan literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan fit model Ropke, program digital yang disediakan koperasi perlu terus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anggota agar dapat mendorong partisipasi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan komunikasi dan interaksi sosial, penggunaan media digital perlu tetap disertai komunikasi langsung agar hubungan sosial, rasa kebersamaan, dan nilai kekeluargaan dalam koperasi tetap terjaga.

Dengan demikian jika dibandingkan dengan tantangan dan hambatan digitalisasi yang dikemukakan oleh Ikhsan et al. (2025), hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga hambatan yang sesuai dengan teori tersebut yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital yang belum merata dan terbatasnya biaya implementasi.

Sementara itu, hambatan berupa kekhawatiran keamanan data belum ditemukan sebagai kendala berdasarkan hasil wawancara. Adapun diluar hambatan

dan tantangan yang dikemukakan oleh Ikhsan et al. (2025) ditemukan adanya hambatan lain yaitu rendahnya kemauan dan ketertarikan generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan kemampuan anggota, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan anggota untuk terlibat dan memanfaatkan layanan digital.

IKOPIN University

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian penelitian mengenai Penerapan dan Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan dan Media Sosial oleh Anggota Studi Kasus pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan dan pemanfaatan digitalisasi di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan telah dilakukan pada beberapa aspek digitalisasi koperasi yaitu digitalisasi tata kelola koperasi, digitalisasi transaksi keuangan serta digitalisasi komunikasi. Pada aspek tata kelola, koperasi telah menggunakan aplikasi untuk pencatatan keuangan, penyusunan laporan serta pemantauan persediaan dan masa kadaluwarsa barang. Pada aspek transaksi keuangan, koperasi telah menggunakan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Sementara itu, pada aspek komunikasi, koperasi telah memanfaatkan WhatsApp, Instagram dan Tiktok sebagai sarana penyampaian informasi dan sosialisasi kepada anggota. Dalam pelaksanaannya, komunikasi digital dan komunikasi secara langsung masih dilakukan secara beriringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan tidak menggantikan interaksi langsung, tetapi menjadi sarana tambahan untuk mempermudah komunikasi dan pelayanan kepada anggota.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan pemanfaatan digitalisasi keuangan dan media sosial oleh anggota meliputi kesesuaian program dengan kebutuhan anggota, kemampuan anggota dalam menggunakan teknologi, komunikasi, pendidikan atau pemahaman anggota, kualitas pelayanan, motivasi atau ketertarikan anggota, serta dukungan dari lingkungan koperasi. Sementara itu, terdapat faktor lain yaitu meliputi dukungan pemerintah, akademisi, masyarakat, serta mitra koperasi yang berperan dalam mendukung pengembangan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan.
3. Kendala dalam penerapan dan pemanfaatan digitalisasi meliputi keterbatasan insfrastruktur teknologi, kemampuan digital anggota yang belum merata, belum terlaksananya pelatihan, serta adanya gangguan teknis seperti *error* dan pemadaman listrik. Jika dilihat berdasarkan tantangan dan hambatan yang dijelaskan Ikhsan et al. (2025) hasil kajian sesuai dengan hambatan berupa keterbatasan infrstruktur teknologi, literasi digital yang rendah dan terbatasnya biaya impelementasi. Sementara itu, kekhawatiran keamanan data belum ditemukan sebagai kendala berdasarkan hasil wawancara. Selain kendala tersebut berdasarkan hasil wawancara terdapat kendala lainnya meliputi adanya tantangan berupa rendahnya ketertarikan pemuda-pemudi untuk berpartisipasi dalam koperasi. Untuk menghadapi kendala tersebut koperasi perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, merencanakan pelatihan bagi anggota, menerapkan digitalisasi secara bertahap, dan menyediakan pencatatan manual sebagai backup ketika terjadi gangguan pada sistem digital. Hal tersebut, menunjukkan bahwa proses digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan masih dalam

tahap perkembangan dan masih memerlukan penyesuaian antara teknologi, kemampuan anggota, serta kebutuhan koperasi.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cileunyi Wetan, disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan layanan digital kepada seluruh anggota secara berkala sehingga kemampuan anggota dalam memanfaatkan teknologi dapat meningkat. Selain itu, koperasi perlu memperkuat infrastruktur digital serta meningkatkan kualitas sistem yang digunakan agar pelayanan kepada anggota menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Bagi anggota koperasi, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan oleh koperasi, mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan, serta memberikan saran dan masukan yang membangun sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan koperasi di era digital.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan fasilitas kepada Koperasi Desa Merah Putih, khususnya dalam meningkatkan literasi digital anggota dan pengurus sehingga implementasi digitalisasi koperasi dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, R. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan* 1st ed. IKOPIN Press.

Aryanti, H. G., Setiadi, I. O., Hastyorini, I. R., & Sari, K. 2018, *Perkoperasian*. Klaten: Cempaka Putih.

Effendy, O. U. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ginanjar, L. 2012. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Wahana Iptek Bandung.

Ikhsan, S., Fahreza, M., & Hidayat, U. 2025. *Pengantar Digitalisasi Koperasi* Universitas Koperasi Indonesia.

Ikhsan, S., & Hidayat, U. 2023. *Modernisasi Koperasi Untuk Menghadapi Tantangan Global*. Jatinangor: Universitas Koperasi Indonesia.

Irawan, H. 2019. *Pengayaan Pembelajaran Sosiologi: Interaksi Sosial.* Surakarta: Aksara Sinergi Media.

Ropke, J. 2012. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rustan, A. S., & Hakki, N. 2017. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Yogyakarta: Deepublish.

Setiawati, R. 2023. *Inovasi Koperasi di Era Globalisasi dan Digitalisasi*. Jatinangor: Universitas Koperasi Indonesia.

Sudariyanto. 2021. *Memahami Interaksi Sosial*. Semarang: Mutiara Aksara.

Sugiyanto, Rima Elya Dasuki, Eka Setiajatnika, & Sugiyanto Ikhsan. (2024). *Koperasi Dalam Perspektif Keuangan: Reformulasi Penilaian Kinerja Menuju Koperasi Modern*. Jatinangor: Universitas Koperasi Indonesia.

Wahyudin, & Hidayat, U. 2022. *Pillihan Kebijakan antara Kepentingan Rentabilitas dan Manfaat Anggota*. Jatinangor: Universitas Koperasi Indonesia

Referensi Lainnya:

Arnom, H. F., Sudarta, B., & Setiawan, W. L. 2025. 'Strategi Komunikasi Interpersonal dan Digital dalam Meningkatkan Kepercayaan serta Partisipasi Anggota Koperasi', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, vol.9, no.3, hh. 3390-3403.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2026. *Survei Internet APJII 2026*.

Azmi, R. (2025, January 2). *Digitalisasi Koperasi: Urgensi, Tantangan, dan Strategi*. Riza Azmi. https://rizaazmi.id/read/opini/digitalisasi-koperasi-urgensi-tantangan-dan-strategi/

Burhanudin, D. 2024.'Pelatihan Perkoperasian, Jati Diri Koperasi, Tujuan dan Ciri-ciri Koperasi Bagi Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Imiah Abdimas,* vol.5, no.1. hh. 1-8

Hasanah, M., Thayyibah, A., & Khairi, M. F. 2023. 'Hakikat Modern, Modernitas Dan Modernisasi Serta Sejarah Modernisasi Di Dunia Barat'. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, vol.1, no.2. hh. 309-318.

Hidayat, M. T. 2022. 'Pola Komunikasi Organisasi Berbasis Digital Pada Perusahaan Nasional Dan Multinasional Selama Pandemi Covid-19'. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis.* Vol.*6,* no.2. hh. 231–246.

Hutasoit, R. 2012. *Proses Interaksi Sosial Dalam Kehidupan Manusia Sebagai Makhluk Sosial*.https://bpsdm.komdigi.go.id/repositori/index.php?p=fstream-pdf&fid=766&bid=659

Ikram, M. 2025. 'Strategi Manajemen Digital Dalam Modernisasi Tata Kelola Dan Layanan Koperasi Di Indonesia: Tinjauan Literatur', *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*, Vol.3, no.4. hh.145-160.

Kemenkop dan UKM. 2010. *Struktur Organisasi Koperasi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010.*

Kominfo Jatim. (2026, June 18). *Kadiskop UKM Jatim: Koperasi Harus Bertransformasi agar Tetap Relevan di Era Digital*. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kadiskop-ukm-jatim-koperasi-harus-bertransformasi-agar-tetap-relevan-di-era-digital

Laporan RAT KDMP Cileunyi Wetan Tahun Buku 2025

Nashoha, A., Rusmiati, & Karima, S. 2024. 'Transformasi Digital Dalam Manajemen Koperasi: Peluang Dan Tantangan', *Central publisher,* vol.2, no.7, hh. 2326-2332.

Pratami, I. I., Hermawan, Y., & Srigustini, A. 2023. 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Tawekal Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya*, Jurnal Sains Student Research,* vol.1, no.1, hh. 727–740.

Ramadhani, S., yasifa, A., & rizky, R. 2024. 'Digitalisasi Administrasi Di Mi', *Jurnal Mappesona,* vol. 7, no. 2, hh. 65-74.

LAMPIRAN







PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Dapatkah Dapatkah bapak menjelaskan sejarah singkat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan?
2. Berapa jumlah anggota yang terdaftar di KDMP Cileunyi Wetan?
3. Bagaimana tingkat keaktifan anggota dalam kegiatan koperasi?
4. Apakah KDMP Cileunyi Wetan sudah menerapkan digitalisasi dalam kegiatan operasionalnya?
5. Apa yang melatarbelakangi keputusan koperasi untuk menerapkan digitalisasi?
6. Sejak kapan digitalisasi mulai diterapkan di KDMP Cileunyi Wetan?
7. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem digital koperasi?
8. Bagaimana bentuk partipasi anggota dalam pemanfaatan layanan digital yang tersedia di koperasi?
9. Bagaimana tanggapan anggota terhadap penerapan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan?
10. Apakah koperasi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau pelatihan terkait penggunaan layanan digital bagi anggota?
11. Apakah anggota pernah menyampaikan saran, masukan, atau kritik terkait penerapan digitalisasi di koperasi?
12. Menurut bapak faktor apa saja yang mendukung keberhasilan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan?
13. Menurut bapak kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapan digitalisasi?
14. Menurut bapak apa manfaat digitalisasi koperasibagi anggota maupun bagi pengurus?
15. Bagaimana pola komunikasi antara pengurus dengan anggota di KDMP Cileunyi Wetan? Apakah sudah menerapkan digitalisasi sepenuhnya atau belum?
16. Menurut bapak apakah dengan digitalisasi ini dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi?
17. Bagaimana kondisi operasional unit-unit usaha yang dimiliki oleh KDMP Cileunyi Wetan saat ini?

18. Menurut bapak upaya apa yang dilakukan koperasi depan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemanfaatan layanan digital?
19. Apa saja pencapaian yang telah diraih oleh KDMP Cileunyi Wetan sejak berdiri?
20. Bagaimana harapan dan rencana pengembangan KDMP Cileunyi Wetan di masa mendatang?
21. Bagaimana harapan Bapak terhadap peran digitalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat?

IKOPIN University

HASIL WAWANCARA

Nama : Dedi Nurendi

Jabatan : Ketua

Usia : 53 Tahun, 15 Februari 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

1. Dapatkah bapak menjelaskan sejarah singkat berdirinya Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan??

   "Baik terima kasih, Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan berdiri pada tanggal 14 April 2025 kemarin, artinya waktu itu penggabungan dari koperasi sebelumnya, kan ada didalam inpres presiden itu ada dua, ada yang baru ada yang boleh penggabungan atau akuisisi, nah kami mangambil opsi penggabungan tadinya koperasi desa merah putih ini adalah koperasi citra jaya abadi, tapi pada tanggal 14 april karena ada program dari bapak presiden prabowo subianto bahwa ada koperasi desa merah putih kita mengadakan rapat anggota terus disaksikan melalui musdesus (musyawarah desa yang khusus) dihadiri orang penting yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat perwakilan beberapa ketua rw lembaga desa LPMD BPBD yang akhirnya menyepakati bahwa citra jaya abadi itu menjadi koperasi desa merah putih, dokumen-dokumennya ada, nanti disampaikanlah ke anggraeni seperti itu.

2. Berapa jumlah anggota yang terdaftar di KDMP Cileunyi Wetan?

   "*Anggota KDMP yang terakhir kemarin sekitar 286 yang ada didalam sistem simkopdes tapi kalo dari angka itu ada yang aktif dan ada yang pasif biasalah namanya juga beragam pola pikirnya karena koperasi ini kan berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan sukarela jadi tidak bisa menekan itulah, ingin menumbuhkan kesadaranlah bagi anggota khususnya warga desa cileunyi wetan".*

3. Bagaimana tingkat keaktifan anggota dalam kegiatan koperasi?

   "Yang aktifnya dia setengah dari itu"

4. Apakah KDMP Cileunyi Wetan sudah menerapkan digitalisasi dalam kegiatan operasionalnya?

   "Alhamdulillah kita sudah menggunakan digitalisasi diantaranya proses pencatatan keuangan, untuk transaksi pembayaran melalui digitalisasi kita

kerjasama dengan primoppol brimob polda jabar, bayar aplikasi itu sebulan sekitar 300.000, karena melalui aplikasi itu kita bisa mengetahui catatan keuangan perhariannya, laporan keuangan perbulan pertriwulan dan kemarin kita sudah melaksanakan RAT selama satu tahun dan bisa mengetahui jumlah barang yang masa kadaluarsa expired sengit jadi kita udah mulai ada digitalisasinya

5. Apa yang melatarbelakangi keputusan koperasi untuk menerapkan digitalisasi?

   "Alasan, karena kitakan dituntut dalam era digital sosial media, kita zaman dulu dan sekarng beda, kita zaman gadget jadi harus berkolaborasi harus mengikuti tren kekinian, karena koperasi tiak bisa ketinggalan, artinya digitalisasi selain pelaporan khusus pembayaran ada yang pake QRIS terus juga kita sosialisasinya pake sosial media dalam arti digital tiktok, wa, instagram, itukan sebagian pada digital jadi kita harus mengikuti perkembangan zamanlah supaya bersaing"

6. Sejak kapan digitalisasi mulai diterapkan di KDMP Cileunyi Wetan?

   "Kalo digitalisasi dalam proses pencatatan itu sudah mulai dulu sebelum bergabung sudah mulai digital cuman ditingkatkan lagi kapasitasnya, sdmnya, karena tentu ada banyak kurang-kuranglah, kita belajar kekurangan mengevaluasi diri untuk lebih baik."

7. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem digital koperasi?

   "Nurul dan suci, nurul sebagai kasir dan suciwati sebagai bendahara di KDMP sebagai pengurus juga. Mereka yang megang akun digitaisasi"

8. Bagaimana bentuk partipasi anggota dalam pemanfaatan layanan digital yang tersedia di koperasi?

   "Belum, karena anggota itu beragam pola pikir dan kemampuan untuk menggunakan itu bervariasi, ada anggota itu berbagai macam kelas yaitu kelas, kelas ibu-ibu, orang tua nah kalo pemudanya jarang, tantangan tersebut bagaimana nanti mengedukasi kepada muda mudi dengan dibantu oleh rekan rekan mahasisiwi, mahasiswa dari univerisitas ikopin bagaimana mengedukasi supaya pemuda dan pemudi itu tertarik pada koperasi, kebanyakan untuk bergabung dikoperasi itu dari kalangan muda mudi kurang nah ini sebuah tantangan, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan observasi atau literasi itu seperti apa edukasinya supaya kalangan pemuda itu bisa menarik terhadap koperasi. Sebagai contoh aja anak bapak. Sudah cukup diayah aja untuk dikoperasi aku tidak tertarik terhadap koperasi

walaupun sekarang ada gembar gembor KDMP, itulah bahan renungan kita, bahan kajian kita, untuk lebih giat lagi bagaimana memaknai tata kelola koperasi dan prinsip kopersi itu sendiri."

9. Bagaimana tanggapan anggota terhadap penerapan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan?

   "Tanggapan dari anggota antusias cuma dalam hal penggunaannya perlu berproses, ada ketidaksiapan dalam hal perangkatnya terus tadi kalo diklasifikasikan kepada golongan usia itu kan harus lihat situasi karena tidak semua anggota memiliki akses itu ya, kita dituntut juga oleh kemenkop harus menerapkan digitalisasi mulai dari simkopdes, bagaimana pencatatan keuangan, bagimana anggota itu harus terupdate terus, apalagi sekarang beberapa KDMP sudah mulai menerapkan itu, nah ini kesiapannya kita diuji. Jangan sampai terjadi bangunannya saja ada isinya kosong, apalagi digitalisasinya itu. Tetap apa yang disampaikan oleh bapak presiden juga kita bertahap jadi jangan melihat angka-angka kuantitasnya 80.8000 sekian tetapi percontohan saja dulu misalkan dari 80.000 itu misalkan hanya 1000 apakah bisa beroperasional atau tidak, jangan tergesa-gesa yang penting ada kegiata operasionalnya dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat luas jadi jangan liat kuantitasnya".

10. Apakah koperasi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau pelatihan terkait penggunaan layanan digital bagi anggota?

    "Belum, masih rencana kita pada saat RAT sempat sudah dicanangkan juga melalui seperti program PAG. Pelatihan buat anggota nanti diterapkan, kita kan berproses ya nanti dianggarkan kan pelatihan itu butuh besaran snacnya, tempatnya dan lain lain kan butuh dana juga kita perlu menyisihkan dari penghasilan"

11. Apakah anggota pernah menyampaikan saran, masukan, atau kritik terkait penerapan digitalisasi di koperasi?

    "Ada masukan dan saran, contoh seperti kemarin ada saran masukan dan kritik ya KDMP ini pertama kurang luas bangunannya sehingga gerai berbelanja masih sempit, barang yang dijualnya tidak terlalu complete yang dibutuhkan akan tetapi kalo masalah harga sudah unggul harga lumayan murah terutama di komoditas minyak, beras dan kebutuhan pokok lah. Tapi kami menyampaikan sebagai pengurus bapak sebagai ketua menyampaikan kalo membandingkannya jangan dengan alfamart indomart ya, jadi membandingkannya harus apple to apple koperasi dengan koperasi lagi. Kalo dibandingkan antara koperasi dan koperasi lagi ya boleh beradulah, contoh aja

kita lihat disekitar jatinangor, cibeusi ada ga KDMP, belum terlau ada yang lengkap ya itu objektif dan profesional. Tetapi kalo dibandingkan dengan alfamart dan indomaret jelas dalam satu desa mereka bisa 1 s.d 7 alfamart dibangun dalam satu desa sedangkan KDMP itu hanya baru ada 1 dalam satu desa akan tetapi itu juga belum semuanya beroperasional.
Kebetulan kita pembangunan KDMP lagi berjalan belum selesai baru sekitar 50 % di eks terminal cileunyi. Akhirnya kritik itu disampaikan kepada yang mengkritik saran jadi dipahami pengurus, dan betul juga kalo perbandingan itu jangan dengan yang berbeda".

12. Menurut bapak faktor apa saja yang mendukung keberhasilan digitalisasi di KDMP Cileunyi Wetan?

    Faktornya banyak, terutama dukungan masyarakat, anggota, pengurus, pengawas. Kebetulan ada juga beberapa faktor eksternal dan internal secara eksternal kita juga yang namanya jual beli atau usaha digerai sembako yang dilebaran kadang gak bayar, ada juga si pengurusnya pindah kerja beberapa faktor kurang lebih itu, tetapi tetep kita dari kelemahan-kelamahan itu terus berinovasi dari segi digitalisasinya dan menjadi evaluasi diri supaya menjadi lebih baik
    Suportnya tetap harus dari anggota, kalo tidak dari anggota siapa lagi yang mendukunganya kan dari kita oleh kita dan untuk kita. Walaupun ya koperasi ini kan bagian dari Mockup. Mockup itu koperasi pencontohan katanya jadi banyak dikunjungi atau studi banding dari beberapa kementerian, dari LPDB tamu tamu dari jakarta banyak yang kesini, terus studi banding dari provinsi aceh, dari padang dari medan dari bogor sama tanggerang, tapi yaitulah karena kita dijadikan contoh ya contoh harus baik dari sisi tata kelola nya digitalnya menyesuaikan dan juga dukungan dari mahasiswa akademisi.

13. Menurut bapak kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapan digitalisasi?

    Kendalanya ada kadang-kadang error atau mati lampu tapi masih bisa ditanggulangi jadi harus datanya itu harus disimpankan dulu didalam file -file terleih dahulu misalkan ketika ketika lagi transaksi tiba tiba mati lampu ga ada pemberitahuan otomatis, terus kadang karena telat bayar 1 hari udah dimatiin sistemnya dari sananya (oh belum transferkan).
    Ada backupan ditulis tangan.

14. Menurut bapak apa manfaat digitalisasi koperasibagi anggota maupun bagi pengurus?

    Oh sangat besar manfaatnya dengan digitalisasi berbasis teknologi IT itu sangat besar karena kita dituntut oleh dinas, ke dinas koperasi kab bandung jawabarat harus melaporkan, kalo tidak pake teknologi digitalisasi kita kerepotan juga karena bukan tidak jaman lagi manual ya, manual ada misalkan dilaporkan mealui PDF kan itu butuh digitalisasi itu, lalu kan ngga tmpuk tumpuk laporan kesini ya cukup pdf tapi otaknya harus jalan ini, perangkat perangkanya harus saling berkesinambungan berkolaborasi tentu sangat bermanfaat sekali

15. Bagaimana pola komunikasi antara pengurus dengan anggota di KDMP Cileunyi Wetan? Apakah sudah menerapkan digitalisasi sepenuhnya atau belum?

    Bisa be to be secara langsung bisa via wa di grup, misalkan kalo ditanyakan terhadap keanggotaan bisa via whatsap digrup, ada yang bisa be to be langsung jadi tergantung orangnya kalo sibuk bisa via wahtsappp pake teknologi dan itu harus ada adminnya dan adminnya itu yang dibawah yang bertugas menjawabnya, KDMP Cileunyi wetan ini untuk pendanaaanya disupport oleh KSP Citra Mandiri Jabbar jadi kalo tidak di support mustahil kita bisa ada operasional. Sistemnya pembagian hasil 60: 40. 60 buat KDMP dan 40 buat KSP Citra Mandiri Jabar , biasanya terbalik kan yang punya modal 60%, akan tetapi karena ini menjadi bapak asuh KSP Citra Manidiri Jabar sebagaimana instruksi dari bapak menteri koperasi pak ferry Juliantono bawa setiap koperasi yang sudah berjalan atau existing harus menjadi bapak asuh bagi beberapa KDMP. Nah kalo yang lain baru mau melakukan kami sudah melakukakan.

16. Menurut bapak apakah dengan digitalisasi ini dapat meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi?

    "ya meningkatkan"

17. Bagaimana kondisi operasional unit-unit usaha yang dimiliki oleh KDMP Cileunyi Wetan saat ini?
    "Sudah beroperasional tapi untuk sekarang ngga semua, KDMP punya 7 gerai yang masih disimpen/ditunda dulu yaitu unit simpan pinjam, gerai klinik. Bukanya masih 1 minggu sekali karena petugasnya dari anak puskesmas cileunyi, kalo gerai apotik obatnya diarik dulu sama kimia farma belum adalagi gantinya, gerai pupuk karena belum memasuki musim tanam jadi di cut dulu, gerai gas masih berjalan dan untuk sekarang fokus ke gerai sembako dulu untuk

gerai lain nanti akan difokuskan di gedung baru kendalanya kalo semisal fokus pada gerai apotek belum ada penghasilan dari laba apotek dan harus menggaji apoteker yag cukup mahal jadi dilakukan pertimbangan lagi"

18. Menurut bapak upaya apa yang dilakukan koperasi depan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemanfaatan layanan digital?
    "Kita sebenernya ga boleh bosan-bosan mengingatkan sosialisasi digitalisasi kepada anggota karena anggota itu sebetulnya mau cuma istialhnya ada permintaan yang belum bisa dipenuhi diantaranya anggota itu mau pinjam, itu kan simpna pijam itu minimal harus jadi anggota dulu terus membayar hak dan kewajiban misalnya gini dia kan bayar SP, SW dan sukarela nah sukarelanya agak lama mau pinjam jadi dikiranya KDMP seperti bagi-bagi bansos ada 5 juta, ada yang 10 juta lagi .
    Koperasi Desa kelurahan Merah belum nerima bantuan pemerintah, jadi yang digembor gemborkan itu dimail alih oleh PT Agrimas belum ada jdi yag tadi bapa sampaikan KDMP Cileuni wetan ini penyertaan modalnya jadi swasta yaitu dari koperasi yang sudah existing itu saja kalo yang lain ga ada yang lain baru hanya bangunan dan mobil kendaraan diuangkan senilaii 3 milyar baik barang barangnya pun belum ada .
    Simpanan pokoknya 10.000 simpanan wajibnya 25.000 kalo buat simpanan sukarelanya berapa aja

19. Apa saja pencapaian yang telah diraih oleh KDMP Cileunyi Wetan sejak berdiri?
    Penvcapaian yang sudah dicapai koperasi
    Dapat bantuan CSR dari BRI 1 unit mobil kendaraan baru Bangunan kedepan direnovasi
    Gedung koperasi didesa jadi gedung bersama diestimasi sekitar 400 jt an
    Koperasi desa merah pputih jadi koperasi percontohan terbaik di jawabarat

20. Bagaimana harapan dan rencana pengembangan KDMP Cileunyi Wetan di masa mendatang?
    Harapannya KDMP ini bisa dirasakan langsung oleh masyarkat terutama dalam hal barang barang yang subsidi sebagaimana yang diharapkan oleh bapak presiden untuk memutus mata rantai barang diantarnya bagaimana memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mensupplyan gas, beras murah, minyak kita itu harga harga yang bersubsidi yang ada di toko-toko lain atau di alfamart indomart itu harapan kami, penyediaan pelayanan bidang sembako pada anggota dan khususnya masyarakat sekitarnya
    Bagaimana pemerintah betul betul harapannya serius apa yang disampaikan itu dari bapak presiden prabowo subianto betul betul nyata dan konkret jangan sampai seperti omong-omong kosong seperti yang sudah sudah jangan sampai ada istilahnya dikhianati oleh pembisik=pembisik atau oknum oknum supaya

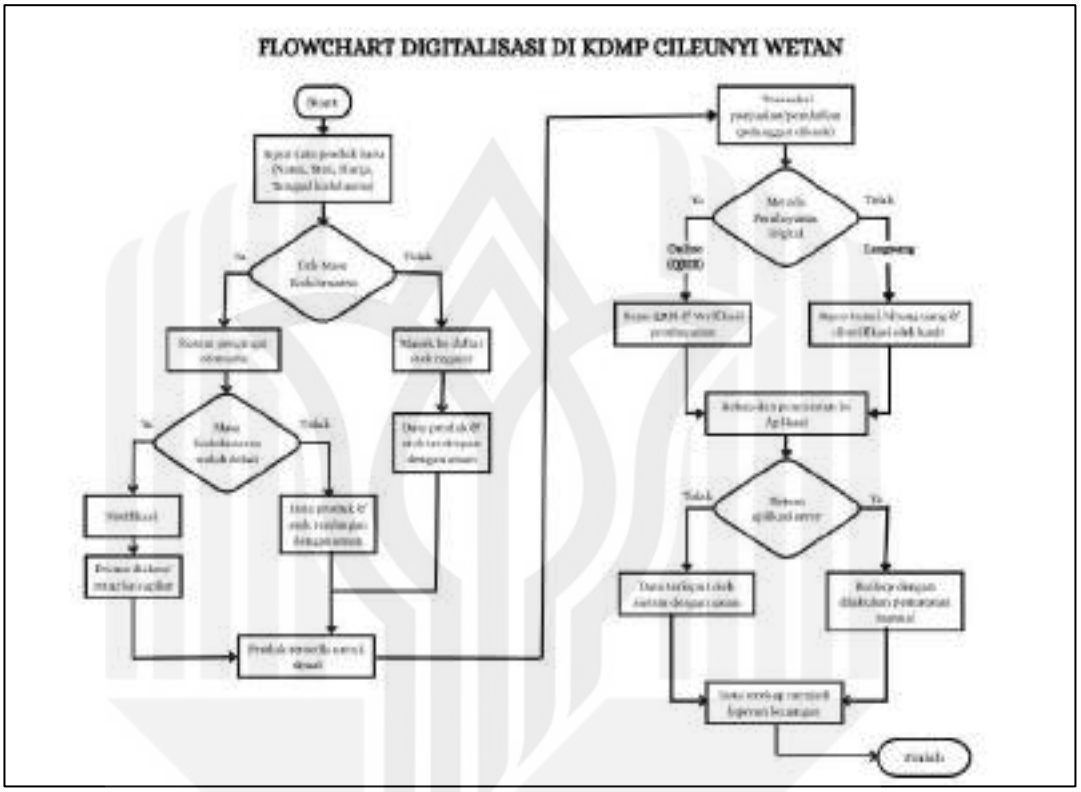
bisa langsung bisa lebih cepat langsung oleh masyarakat dan nantinya bisa menjangkau bagaimana petani -petani bisa mendapat pupuk yang murah kan nanti imbasnya jadi bahwa kepada pemerintah bahwa betul betul bahwa kdmp ini bisa menjalankan amanah konsekuensinya menjalankan amanh rakyaktanya janji janji kampanye itu sperti itu
Kami juga kdmp cileunyi wetan Berharap banyak bisa membantu mensejahterakan anggota pada hususnya dan umunya masyarakat desa cileunyi wetan

21. Bagaimana harapan Bapak terhadap peran digitalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat?
Harapannya kdmp cileunyi wetan ini menjadi tempat sebagaimana berkolaborasi dengna teknologi anggota bisa melek teknologi biar bisa mengakses informasi informasi yang aktual dari koperasi itu sendiri misalnya kalo misalnya nih minggu ini harga minyak dapat diskon misalkan beras dapat diskon beras ada gas ada supaya hal itu bisa membuat mamsyaraka dan anggota bisaa mengetahui melalui program digital.Intinya bagaimana harapan kami bisa sejahtera anggota dan masyarakat bisa terdampak oleh koperasi, sehingga anggota merasakan bahwa dengan bergabungnya dengan KDMP bisa merasakan manfaatnya kalo tidak ada manfaatnya buat apa.

IKOPIN University

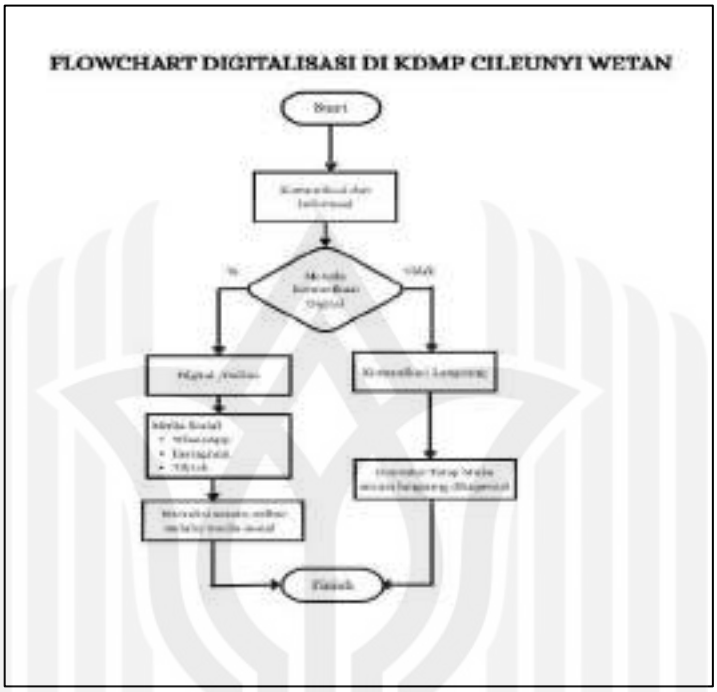
FLOWCHART

1. Flowchart Digitalisasi Tata Kelola dan Transaksi Kuangan



IKOPIN University

2. Flowchart Digitalisasi Komunikasi



IKOPIN University